

ANDANG SUBAHARIANTO

# MEMBALIK ARUS BALIK



 press

# **MEMBALIK ARUS BALIK**

# MEMBALIK ARUS BALIK

ANDANG SUBAHARIANTO



# MEMBALIK ARUS BALIK

© Andang Subaharianto, 2020

**Penyunting:** Muttafaqur Rohmah

**Desain sampul dan isi:** Partikelir

Cetakan pertama, Oktober 2020

x + 137 halaman

14 x 21 cm

ISBN 978-602-53709-9-1

Diterbitkan Oleh :

**UNTAG B-PRESS (Anggota IKAPI)**

Alamat Redaksi :

Jalan Adi Sucipto No.26 Banyuwangi

Telp. 0333411248 - Fax:0333411248

Distributor Tunggal :

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**

Jalan Adi Sucipto No.26 Banyuwangi

Telp. 0333411248 - Fax:0333411248

Email:untagbpress@gmail.com

**Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.**

Sanksi pelanggaran pasal 113 undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta:

1. setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# Daftar Isi

PRAKATA PENULIS — vii

KATA PENGANTAR: Dr. Haryatmoko — ix

Politik Wajah	— 1
Grha Pena	— 5
Bahasa Internasional	— 9
17 April	— 13
Kebaya Kartini	— 17
Fajar Kebudayaan	— 21
Permusyawaratan	— 27
Kesabaran Berujung Kemenangan	— 33
Kapitalisasi Penanda	— 39
Gaya Hidup dan SDM	— 43
Kado Istimewa	— 47
Petani Kok Miskin?	— 51
Mi Setan Haram?	— 55
Nadiem, Sabarlah...	— 59

Merdeka Belajar	— 65
Berenanglah Di Lautan	— 69
Membalik Arus Balik	— 73
Antropologi Covid-19	— 79
Setiap Angka adalah Wajah	— 83
Tanpa Mudik	— 89
Ambyar	— 93
Kebangkitan 2020	— 97
Kenormalan Baru	— 101
Ratu Adil, Trisila...	— 107
Menunggu Lawan	— 113
Merdeka dari C-19	— 119
Gambar Haji Girah	— 125
Bulan Bahasa	— 131

# PRAKATA PENULIS

**A**lhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya buku kedua terbit pula. Seperti buku pertama, buku kedua ini juga berisi 28 judul esai saya yang pernah terbit di *Jawa Pos Radar Banyuwangi*. Mengapa 28 judul? Alasannya sama. Pertama, pertimbangan ketebalan buku. Agar tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis. Kedua, mengambil semangat angka 28. Sumpah Pemuda tanggal 28 dan tahun (19)28.

Dibandingkan buku pertama, buku kedua ini agak berbeda susunannya. Bila buku pertama dibagi ke dalam tema kebangsaan, politik, dan kebudayaan, buku kedua ini tidak dibedakan menurut tema. Agak sulit juga memilah berdasarkan tema, karena materinya bersinggungan di antara tema-tema tersebut. Karena itu, di buku kedua ini susunan tulisan dibuat berdasarkan urutan waktu. Tulisan yang paling awal terbit di *Jawa Pos Radar Banyuwangi* ditaruh pada bagian awal, begitu seterusnya hingga tulisan terakhir.

Judul buku diambilkan dari judul salah satu esai di buku ini, yakni “Membalik Arus Balik”. Judul ini dipilih, karena semangat tulisan-tulisan di buku ini cocok dengan isi tulisan yang judulnya terpilih sebagai judul buku. Nusantara pernah besar, mestinya Indonesia juga bisa meraih kebesaran itu lagi. Seperti yang sering kita nyanyikan, INDONESIA RAYA.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Dr. Haryatmoko, yang di tengah kesibukannya masih bersedia membuat kata pengantar untuk buku ini. Kepada Untag B Press yang bersedia menerbitkan catatan-catatan saya. Kepada *Radar Banyuwangi* yang setia menerbitkan catatan saya selama ini. Juga kepada Mbak Anggi Amanda, Kepala Humas Untag Banyuwangi, yang menghubungkan dengan *Radar Banyuwangi*, dan mengingatkan saat *deadline*, bahkan turut mengoreksi kesalahan penulisan. Terima kasih juga kepada teman-teman Untag Banyuwangi atas kerjasama yang baik selama ini.

Terkhusus, terima kasih kepada Mas Gik (Sugihartoyo), Ketua Perpenas Banyuwangi, dan Adinda Sonny T. Danaparamita, Ketua Dewan Kehormatan Perpenas, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI. Juga kepada kawan saya, Dr. Ahmad Basarah, Ketua Umum PA GMNI yang juga Wakil Ketua MPR RI. Catatan itu mustahil saya buat tanpa dukungan orang-orang baik itu.

Masukan dan kritik dari pembaca tentu sangat saya nantikan. Demi perbaikan terbitan berikutnya. Akhir kata, semoga buku bunga rampai ini bermanfaat, baik bagi teman-teman Untag Banyuwangi maupun masyarakat pada umumnya.

*Banyuwangi, 28 Oktober 2020.*



# KATA PENGANTAR

*Oleh: Dr. Haryatmoko*

**F**akta tidak pernah telanjang. Informasi selalu interpretasi. Apalagi bahasa bisa digunakan untuk beragam fungsi dan memiliki berbagai konsekuensi. Oleh karena itu, fenomena yang sama bisa dideskripsikan dengan beragam cara: ada variasi laporan, pemberitaan, berbagai skenario cerita, ada yang fiksi, representasi atau virtual. Konteks penggunaan bahasa yang beragam itu dan kemampuan membedakan antara fakta dan opini menjadi celah yang menggarisbawahi ketajaman tulisan-tulisan pendek Andang Subaharianto.

Dari masalah budaya, politik, pendidikan sampai penggunaan bahasa tidak lepas dari pengamatan dan analisis kritis penulis buku kumpulan artikel ini. Tulisan-tulisannya sangat diwarnai oleh kalimat-kalimat pendek yang bernas. Analisisnya menunjukkan bahwa bukan sekedar pengetahuan umum atau akal

sehat saja yang dipakai. Kelihatan bahwa penulis memiliki pengetahuan yang mendalam tentang semiotika, teori kritis dan linguistik.

Tulisan bukan hanya hasil dari ketrampilan jurnalisme, namun mengandaikan penguasaan instrumen intelektual yang memberi bobot ketajaman dan kejelian analisisnya. Penguasaan teknik jurnalistik kelihatan dari penggunaan kalimat-kalimat pendek yang runtun dan mudah dipahami. Ini membenarkan bahwa bahasa memang hasil dari konstruksi. Sedangkan ketajaman analisisnya terlihat dari kemampuan tulisannya sampai masuk menembus fakta. Ketajaman inilah yang membuat bahasa bisa mengonstruksi fakta bagi pembacanya untuk membentuk opini publik.

Dengan tulisan-tulisan pendeknya itu, penulis sebetulnya membantu pembaca untuk membongkar bahwa di balik bahasa atau di balik informasi terkuak adanya retorika, manipulasi dan penyesatan. Tulisan-tulisannya tidak menggurui dan bukan bentuk pembodohan, tetapi pemberdayaan masyarakat untuk berpikir kritis. Sayang bahwa penulis hanya berhenti pada kumpulan artikel. Seandainya gagasan-gagasan pokok yang sudah dikembangkan di tulisan-tulisan ini memberi inspirasi untuk mendorong ke penelitian lebih mendasar tentang fenomena budaya atau politik, pasti akan mencerahkan karena gaya bahasanya komunikatif. Semoga pembaca terhibur dan terbantu menembus fakta yang ternyata tidak pernah telanjang.

*Yogyakarta, 15 Oktober 2020*

# 1

## Politik Wajah

**W**ajahnya lebam. Menyeramkan. Sangat berbeda dengan sebelumnya. Cantik, meski sudah tua. Kata-katanya pun mengiba. Mengaku dianiaya.

Manusia mana yang tak iba? Siapa yang tak marah? Dan, benar. Dengan piranti teknologi digital hari ini tulisan, gambar, video wajah lebam itu segera memadati ruang publik. Simpati dan komentar pun mengalir. Cepat dan deras.

Warganet heboh. Dari berbagai kalangan. Ada yang sekadar simpati. Mendoakan segera sembuh dan pelakunya segera ditangkap. Tapi, ada pula yang nyinyir, politis. Bersimpati sambil menonjok lawan politik. Seolah-olah penganiayaan terhadap perempuan tua itu kerjaan lawan politik. Maklum, tokoh yang berwajah lebam itu dikenal sebagai aktivis politik. Di barisan

oposisi. Bahkan, masuk jajaran elite calon presiden-wakil presiden penantang petahana.

Kritikannya sering tajam. Pernah mendirikan teater Satu Merah Panggung. Pernah pula mengangkat kasus pembunuhan Marsinah, aktivis buruh, ke dalam panggung teater. Kasus yang menghebohkan jagad politik Orde Baru pada dekade 1990-an.

Sepekan kemudian sang aktor tiba-tiba mengakhiri aksi teatrisnya. “Saya pencipta hoaks terbaik,” katanya saat konferensi pers, 3 Oktober 2018. Ratna Sarumpaet, pemilik wajah lebam yang viral di media sosial, mengaku tak pernah dianiaya siapa pun. Alias hoaks. Berita bohong. Wajah lebam itu akibat operasi plastik. Operasi sedot lemak pipi beberapa hari sebelumnya.

Jagad media sosial pun gempar kembali. Hoaks telah menyelinap di jutaan ponsel pintar warganet. Kecerdasan warganet pun *dikerjain*. Emosinya diaduk-aduk. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sampai usul tanggal 3 Oktober ditetapkan sebagai “Hari Anti-Hoaks Nasional”. Mungkin karena sangat geregetan.

Wajah memang bagian tubuh yang paling metaforis dengan politik. Namanya “politik wajah”. Hampir semua urusan kehidupan masyarakat berhulu-hilir di politik. Urusan tubuh pun berhulu-hilir di wajah. Ratna Sarumpaet mendatangi dokter bedah plastik karena politik wajah. Agar tampak lebih muda. Agar kelihatan lebih segar. Ingat, Ratna Sarumpaet adalah tokoh publik. Sering tampil di depan publik. Sering disorot kamera televisi. Politik wajah tentu penting baginya.

Kita pun sangat peduli terhadap wajah. Bagian tubuh lain boleh dibiarkan. Tidak untuk wajah. Harus dikontrol setiap saat. Melalui cermin. Tak perlu cermin besar. Yang penting cukup untuk melihat wajah saja. Wajah cerminan eksistensi manusia. Wajah adalah tanda. Bukan personal-psikologis saja. Tapi, juga sosial, ekonomi, bahkan kebudayaan.

Maka, suami pasti hafal wajah istrinya. Suami hafal makna setiap perubahan wajah istrinya. Istri pun hafal wajah suaminya. Istri juga mengerti maksud di balik perubahan wajah sang suami. Setiap perubahan wajah memiliki pesan. Menandai sesuatu. Pun wajah lebam Ratna Sarumpaet dengan *caption* “dianiaya”. Meski hoaks. Pemain politik wajah terbaik hari ini.

Sebenarnya politik wajah bukan hal baru. Para dalang wayang kulit sudah sering mempertontonkannya. Tokoh punya kesaktian berganti wajah, *alibrupa*. Untuk mengelabui lawannya. Demi kepentingan-kepentingannya. Begitulah Rahwana saat hendak menculik Dewi Shinta. Bukan wajah Rahwana yang dilihat istri Sri Rama itu. Tapi, wajah orangtua yang lemah. Yang mengiba-iba. Supaya Shinta menolongnya. Dan, sukses. Dibawalah Shinta ke negeri Alengka.

Pemerintah Orde Baru pun pernah memainkan politik wajah dengan sempurna. Untuk bertahan tiga dasawarsa lebih. Memainkan politik topeng, politik *ethok-ethok* (pura-pura). Partai politik dikebiri. Ormas diawasi. Pers diancam bredel. Kampus pun disterilisasi. Seluruh saluran aspirasi dibungkam. Tak boleh ada kritik. Tak boleh ada unjuk rasa. Seniman kritis dilarang pentas. Buku-buku yang kontra dengan pemerintah dilarang beredar. Meski buku akademik. Meski hanya novel.

Di arena semacam itu realitas sosial dan tingkah laku warga masyarakat dibentuk. Politik lalu hanya sebuah pentas tempat orang mempertontonkan kehebatan akting *ethok-ethok* (pura-pura). Pemilu *ethok-ethok*, DPR *ethok-ethok*, partai politik *ethok-ethok*, demokrasi *ethok-ethok*.

Yang terpenting bagaimana menggunakan topeng secara sempurna. Di depan sang raja. Biar raja senang, asal bapak senang (ABS). Maka, ketika kekuasaan berada pada wilayah yang hegemoninya lemah, terpaksa bersandar pada intrik, bujukan

dan gertakan. Terkutuklah yang tak bertopeng. Habislah yang membuka topeng.

Hari ini teknologi makin memanjakan politik wajah. Teknologi permak wajah dan foto makin canggih. Buat mengubah tampilan. Agar sesuai kepentingan. Yang kurang keren, bisa dibuat keren. Yang kurang wibawa dan muda, bisa dibuat wibawa dan muda.

Medianya pun makin canggih. Digital berjejaring. Cepat, luas, dan mudah. Juga tak ada sensor. Bukan lagi media yang menggunakan mesin cetak. Maka, baliho, spanduk, poster konvensional akan menjadi masa lalu. Sekarang serba digital. Maka, di tahun politik ini kita akan menyaksikan digitalisasi wajah untuk kepentingan politik.

Yang di lapangan pun mengalami transformasi. Wajah tak lagi representasi eksistensi orang yang lengkap dengan gagasannya. Wajah telah bernilai rupiah. Makin sering nongol, makin sering pula rupiah keluar. Saya sering mendengar keluhan soal ini. Padahal keterpilihan tak linier dengan jumlah rupiah yang keluar.

Di era digital berjejaring politik wajah akan makin meninggalkan tatap muka. Makin menjauh dari usaha menemukan fakta. Orang cenderung mendahulukan emosi. Mengutamakan keyakinan personal. Tergesa-gesa.

Ratna Sarumpaet membuktikannya. Dia bukan saja pencipta hoaks terbaik hari ini. Tapi, juga memperlihatkan dengan telanjang bahwa kita tak punya kesempatan dan kemampuan menilai apakah wajah kita fakta atau hoaks. Bahkan, tak peduli. Kita prihatin!

*8 Oktober 2018*

## 2

# Grha Pena

**R**abu malam lalu saya hadir di Grha Pena Banyuwangi. Atas undangan Mas Samsudin Adlawi, Direktur *Jawa Pos Radar Banyuwangi*. Acaranya peresmian markas baru *Jawa Pos Radar Banyuwangi*. Mas Samsudin mengklaim kantor barunya itu unik, estetik, dan futuristik. Bergaya “posmo”. Saya sempat terkecoh. “Belum jadi *kok* diresmikan,” bisik saya dalam hati. Ternyata memang konsep arsitekturnya seperti itu.

Perancangnya pun bukan sembarang orang. Andra Matin, arsitek terkenal di negeri ini. Bila kita ke Bandara Blimbingsari, kita akan menikmati salah satu karya Andra Matin. “Kalau dilihat dari atas, akan tampak seperti penari gandrung,” kata Samsudin menjelaskan keunikan-keestetikan gedung barunya.

Sang Direktur juga menjelaskan mengapa Grha Pena. Bukan *graha*. Tidak memakai huruf a pada suku kata pertama kata

*grha*. Menurut bahasa asalnya, bahasa Kawi, yang berarti rumah adalah kata *grha*. Sementara kata *graha* – yang sudah kita akrabi – bermakna buaya. Karena bangunan itu dipakai tempat bekerja para jurnalis dan jurnalis sering dimetaforkan dengan pena, disebutlah *grha pena*.

Menurut peribahasa, pena lebih tajam daripada pedang. Pedang hanya personal. Pena bisa bersifat masal. Maka, sekali tebas, ribuan bahkan jutaan bisa terluka. Jejaknya sulit dihapus. Pena memang instrumen penting jurnalisme koran (surat kabar).

Malam itu saya lalu mencermati undangan yang hadir. Tak ada yang spesial. Yang hadir adalah generasi produk mesin cetak. Generasi koran. Para pembaca koran. Mereka yang sarapannya ditemani koran. Meski sebagian sudah membaginya ke gawai (*gadget*).

Saya tak melihat lapis generasi baru yang dalam sepuluh tahun lagi menjadi penentu masa depan negeri ini. Anak-anak *now*, generasi Z. Generasi yang tak dapat hidup tanpa gawai. Yang sarapannya ditemani gawai. Yang sedih bila sinyal ponselnya jelek. Seolah-olah masa depannya juga jelek. Untuk apa mereka diundang? Aneh memang mengundang mereka. Pasti tak ada dalam benak Mas Samsudin dan para punggawa *Radar Banyuwangi*. Tak berkaitan. Saya pun berpikir seperti itu.

Tapi, malam itu tiba-tiba pikiran saya melayang menuju kelas Pengantar Jurnalistik yang saya ampu di kampus Jember. Sebanyak 40 generasi Z ikut kelas tersebut. Saat pertama kali masuk kelas, saya bertanya, siapa yang hari ini baca koran? Tak satu pun angkat tangan. Siapa yang dalam satu minggu terakhir baca koran? Nihil. Lalu, siapa yang dalam satu bulan terakhir baca koran? Tak ada.

Saya tak paham. Untuk apa kelas jurnalistik diberikan, sementara yang mengikuti tak lagi mengonsumsi koran? Kelas



jurnalistik itu pasti akan bicara informasi standar koran, standar ilmu jurnalistik. Ada prinsip kelengkapan, keberimbangan, kehati-hatian, kemanfaatan. Setiap informasi dipastikan validitasnya. Informasi yang bersifat hoaks tak masuk standar koran.

Maka, pertanyaan saya malam itu, di manakah Grha Pena Banyuwangi yang unik, estetik dan futuristik itu akan memberi ruang buat anak-anak yang hari ini tak lagi mengonsumsi koran, yang media bacanya sudah beralih ke layar ponsel?

Hari ini koran sudah disebut "media konvensional". Boleh jadi sekonvensional wartawannya. Memegang notes, bolpen, mencatat yang diomongkan sumber berita. Meskipun kerja wartawan sekarang tak lagi sekonvensional itu. Tak lagi mencatat. Mereka pun khusyuk dengan gawai. Barangkali merekam, mencatat dengan gawai, atau bisa juga tengah berhubungan entah dengan siapa. Istilah kerennya: *multitask*. Sambil mendengarkan yang di sini, berhubungan dengan teman yang di sana, pacar, saudara, dan lain-lain. Tapi, tetap saja hasil kerjanya baru esok hari bisa dikonsumsi. Harus menunggu looper. Harus ke kios dulu, alun-alun, atau lampu merah simpang empat. Koran sampai pembaca tetap dengan cara konvensional.

Oposisi binernya adalah media berjejaring (*online*), termasuk media sosial. Prinsip standar jurnalisme koran tak berlaku. Unsur kecepatan yang menjadi tekanan dalam proses produksi media berjejaring membuatnya hanya mampu menyajikan berita instan. Isi kurang lengkap. Terpecah-pecah. Padahal, unsur kelengkapan berita yang dikenal sebagai 5W+1H, yaitu *what* (apa), *who* (siapa), *when* (kapan), *where* (di mana), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana), serta unsur tambahan *so what* menjadi alat ukur baku karya jurnalistik.

Media sosial (*Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp*) lebih liar lagi. Orang dengan gampang menjadi pewarta, fotografer,

editor, pembuat *meme*. Bisa pula rangkap peran. Pewarta sekaligus sumber berita. Karyanya disebar ke publik dengan cepat dan murah melalui akun pribadinya. Siapa yang bisa memastikan bahwa yang disebar ke publik itu fakta? Pembaca tentu masih ingat kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

Tapi, media sosial tak bisa diremehkan. Perannya pun mulai menggeser koran dalam pembentukan opini publik. Mulai diperhitungkan sebagai referensi publik. Meski tak berkantor. Meski belum ada teorinya.

Di tengah lanskap media yang sedang berubah itu Grha Pena Banyuwangi dibangun. Dan, Rabu malam itu diresmikan. Tantangannya sangat berat. Mirip kelas jurnalistik saya, yang ternyata pesertanya sudah tak membaca koran. Tapi, mereka tak bisa diabaikan. Mereka konsumen informasi. Jumlahnya sangat banyak. Mereka juga pemilik masa depan.

Kita tak ingin Grha Pena kelak dikunjungi orang hanya karena pesona arsitekturnya. Mereka tahu dari media sosial. Lalu, terbang di atasnya. Melihat bangunan bak penari gandrung. Lalu, datang dan menikmati Grha Pena. Yang dindingnya sudah berbalut lumut tebal. *Selfie*, lalu pergi.

Bukan seperti itu. Grha Pena harus tetap menjadi rumah bekerja para jurnalis. Mengawal peradaban. Meski tak berpena lagi. Apapun wujud jurnalismenya nanti. Selamat berbakti untuk negeri.

20 Oktober 2018

# 3

## Bahasa Internasional

Usianya sudah 90 tahun. Sejak dinyatakan sebagai bagian identitas “bangsa” baru. Melalui Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928: Satu Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

Saya membayangkan 90 tahun lalu. Sejumlah anak-anak muda yang usianya baru dua puluhan tahun berkumpul di Jakarta (Batavia). Mereka mewakili “jong-jong”, organisasi pemuda yang ada di Hindia-Belanda kala itu. Dari Jawa, Sumatra, Maluku, Sulawesi, Papua. Juga wakil pemuda Tionghoa.

Mereka adalah generasi terpelajar awal bangsa Indonesia. Kecerdasan dan semangat juangnya tak diragukan. Mimpi dan visinya jelas. Coba bayangkan! Tahun 1928, saat kota-kota besar di Jawa baru saja tersambung sarana transportasi kereta api. Masih dengan mesin uap dari bara api. Yang kepulan asap hitamnya menggores langit yang dilalui. Bukan dengan mesin

berbahan bakar minyak yang mampu melaju dengan kecepatan 100 km per jam.

Tapi, mereka bisa bertemu. Berkongres. Menggagas sebuah komunitas baru yang disebutnya “bangsa Indonesia”. Mengaku bertanah air satu yang disebutnya “tanah Indonesia”. Menjunjung bahasa persatuan yang disebutnya “bahasa Indonesia”. Kecerdasan, mimpi, visi, dan semangatnya kelas wahid.

Apa yang mereka sebut “Indonesia” barulah dikatakan. Baru pernyataan. Belum kenyataan. Tapi, bukan pernyataan *ngawur*. Bukan pernyataan mentah. Apalagi hoaks. Pernyataan yang disebut Sumpah Pemuda itu penuh isi dan matang. Hasil telaah mendalam dari berbagai segi. Penuh dialektika antara aksi dan refleksi.

Coba kita tarik satu saja yang bahasa Indonesia. Mereka menjunjungnya sebagai bahasa persatuan. Hebat sekali. Cerdas dan kreatif sekali. Gagasan tentang bangsa yang dirajut dari berbagai aneka sukubangsa jelas butuh satu bahasa persatuan. Sekaligus simbol perlawanan terhadap kolonial yang diwakili bahasa Belanda.

Hebatnya bukan dicari berdasarkan jumlah penutur bahasa sukubangsa yang menjadi bagian bangsa Indonesia. Tapi, dipilih berdasarkan realitas sosiolinguistik. Mereka menyadari ada bahasa yang telah melembaga dalam pergaulan antarsukubangsa di Nusantara ini, *lingua franca*. Yakni, bahasa Melayu Riau. Meski hanya bahasa pasar. Meski hanya variasi rendahan bahasa Melayu. Tapi, dengan gagah berani mereka menjunjungnya menjadi bagian identitas kebangsaan. Dan, orang Jawa, Sunda, Madura pun tak marah karenanya.

Sejak itu bahasa Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Bukan lagi sekadar *lingua franca*. Fungsinya pun diperluas. Gengsinya diangkat. Para tokoh pergerakan menulis dan pidato

dengan bahasa Indonesia. Sastrawan berkarya dengan bahasa Indonesia. Rapat-rapat pergerakan menggunakan bahasa Indonesia.

Lalu, teks proklamasi kemerdekaan pun ditulis dengan bahasa Indonesia. Naskah UUD 1945 pun berbahasa Indonesia. Dan, ujungnya bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsinya diperluas. Gengsinya juga dinaikkan. Dipakai untuk kegiatan resmi kenegaraan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Kini bahasa Indonesia makin mantap. Fungsinya tak diragukan lagi. Jutaan karya ilmiah ditulis dengan bahasa Indonesia. Jutaan karya sastra juga berbahasa Indonesia. Meski sikap positif dan kebanggaan masyarakat bisa dibilang masih memprihatinkan. Gengsi sosial bahasa Indonesia masih dianggap rendah dibandingkan bahasa asing. Maka, orang Indonesia pun belajar bahasa Indonesia cenderung asal-asalan. Di mata saya, kemampuan berbahasa Indonesia orang Indonesia masih memprihatinkan.

Tapi, saya optimis. Saya juga menangkap keyakinan kuat para penggagas Sumpah Pemuda 90 tahun lalu terhadap masa depan bahasa Indonesia. Yakni, potensinya menjadi bahasa internasional. Saat Indonesia berusia satu abad (2045) nanti saya yakin bahasa Indonesia telah menapak sebagai bahasa dunia. Potensinya besar.

Lihatlah jumlah penduduk Indonesia hari ini. Sebesar 265 juta jiwa. Keempat terbesar setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Diperkirakan akan terus tumbuh. Mencapai puncaknya pada 2062. Pada pertumbuhan puncak itu diperkirakan sebanyak 325 juta jiwa.

Yang menarik, strukturnya bagaikan piramida. Pada tahun ini jumlah usia 0 – 30 tahun mendominasi. Artinya, dua puluh tahun akan datang Indonesia didominasi penduduk usia produktif. Hanya butuh sinergi yang baik. Antara manusia usia produktif

itu dengan kekayaan alam dan kebudayaan yang juga potensial.

Berati Indonesia dua puluh tahun akan datang adalah pasar potensial dunia. Banyak gula di sana. Mengundang para semut berdatangan. Dari berbagai belahan dunia. Semut-semut itu mau tak mau harus belajar bahasa Indonesia. Seperti kita hari ini belajar bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Untuk mendapatkan gula.

Maka, saya pun membayangkan dua puluh tahun akan datang. Mekkah dan Madinah akan dipadati orang Indonesia berdasarkan teori kebutuhan Maslow. Masuk akal pula Raja Fahd datang ke Indonesia membawa visi 2030. Orang Indonesia yang mayoritas muslim tentu akan menjadikan dua kota suci di Arab Saudi itu untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas. Saat kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Dan, orang Arab pun akan makin banyak yang butuh bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia akan mendunia. Di bandara, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan dan wisata dunia akan terdengar pengumuman-pengumuman berbahasa Indonesia. Sejalan dengan kekuatan ekonomi (dan kebudayaan) bangsa Indonesia. Barangkali ini pula yang menyakinkan para pendiri bangsa terhadap pilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bukan bahasa bangsa penjajah (Belanda). Saya pun optimis.

*28 Oktober 2018*

# 4

## 17 April

**17** April 2019. Hari amat penting bagi bangsa Indonesia. Kita punya hajad akbar. Yang amat penting. Pada hari ini Indonesia memilih para pemimpinnya. Untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Juga memilih anggota DPD. Secara bersamaan.

Ada 190 juta lebih pemilih. Mereka akan berbondong-bondong menuju TPS. Sungguh pesta demokrasi super akbar. Penuh rintangan dan tantangan.

Para calon pemimpin juga telah berkampanye. Berbulan-bulan. Baik secara tertutup maupun terbuka. Baik langsung maupun tak langsung. Dan, mestinya kita (rakyat) sudah tahu siapa mereka. Tahu apa yang mereka pikirkan. Tahu apa yang akan diperbuat bila terpilih.

Baik para calon pemimpin maupun rakyat juga belajar banyak hal. Selama kampanye kemarin. Belajar membaca realitas. Belajar membaca narasi. Belajar mengkritik dan dikritik. Belajar mempengaruhi.

Juga belajar sabar. Menahan emosi. Saya merasakan, kampanye pemilu 2019 terasa lebih “keras” daripada kampanye pemilu sebelumnya. Barangkali salah satunya karena faktor media sosial. Media sosial telah memainkan peran yang sangat menonjol pada kampanye kemarin. Emosi kita pun diaduk-aduk oleh narasi media sosial. Dan, tidak sedikit yang hoaks, provokatif, menghasut. Yang disebut *post truth* telah mewarnai pemilu 2019.

Pendek kata, kita belajar sistem, sekaligus budaya demokrasi. Maka, siapa pun yang terpilih, sudah sepatutnya diterima. Mereka lah pemimpin kita lima tahun mendatang. Mereka akan menjadi nahkoda kapal NKRI. Yang akan berlayar mengarungi samudera dunia. Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya.

Kepemimpinan pada hakekatnya adalah soal waktu dan pilihan (prioritas) kebijakan. Kepemimpinan bukan praktik sulap yang bisa mengubah segalanya. Sang pemimpin hanya membaca realitas. Mereka menafsirkan realitas itu, lalu membuat pilihan-pilihan kebijakan.

Jangan bayangkan sang pemimpin bisa melakukan semua hal. Menyulap realitas. Orang (pemimpin) ada masanya. Masa tentu ada orangnya. Tapi, yang pasti, kita tak mungkin berjalan mundur. Tak mungkin membalik arah sejarah.

Kita (bangsa Indonesia) telah menjadi bagian penting sejarah peradaban dunia. Kita adalah produk peradaban dunia. Bangsa Indonesia adalah produk sejarah. Tapi, pada sisi lain, kita juga agen peradaban. Saya yakin, Indonesia punya potensi membentuk peradaban dunia ke depan. Siapa pun pemimpin kita lima tahun mendatang tak mungkin menutup Indonesia dari pergaulan dunia. Dari dinamika sejarah peradaban dunia.



Kini dunia menghadapi tantangan peradaban baru. Akibat Revolusi Industri 4.0. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, terutama di bidang komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan perubahan cara hidup manusia. Dunia menghadapi era disrupsi. Lembaga-lembaga dipaksa berubah secara radikal. Tak terkecuali di Indonesia. Soal ekonomi, lapangan kerja, keadilan sosial, pendidikan, kesehatan, dan banyak hal lagi akan mendapatkan perspektif baru dalam konteks Revolusi Industri 4.0.

Bagi kita, era disrupsi yang dibawa Revolusi Industri 4.0 akan sangat mengejutkan dan memusingkan. Pada satu sisi, kita masih konsolidasi ke dalam untuk memantapkan bentuk kelembagaan. Tapi, pada sisi lain harus beradaptasi dengan peradaban baru akibat Revolusi Industri 4.0. Tentu sangat berat bagi Indonesia. Tidak mudah. Mengapa?

Kita sebagai negara-bangsa pascakolonial memikul beban sejarah yang tak ringan. Kita bukan hanya ingin maju. Tapi, kemajuan itu haruslah menuju cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada tiga hal penting yang mau tak mau menjadi referensi agar kemajuan itu berjalan ke arah cita-cita kemerdekaan. Siapa pun pemimpin kita nanti.

Pertama, ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila harus dibahasakan menjadi sistem-sistem, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan. Pancasila harus pula menjadi moral bernegara bagi pengelola negara.

Kedua, realitas keragaman bangsa Indonesia. Indonesia terdiri atas banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. Pulaunya juga banyak sekali. Lebih 17.000 pulau. Penduduknya terbesar keempat di dunia. Kita memikul beban menjaga kohesi sosial. Menanamkan kepada para warga negara sikap dan pandangan yang toleran terhadap keragaman. Maka, sang pemimpin harus tegak menjaga NKRI.

Ketiga, dinamika global. Indonesia tidak mungkin menutup diri. Tapi, dinamika global haruslah dijaga agar tidak ada elemen bangsa kita yang dirugikan. Maka, kolaborasi yang saling menguntungkan adalah strategi yang harus dikembangkan. Kita harus maju bersama. Kita harus menikmati keberkahan bumi-langit, alam semesta, secara bersama-sama.

Maka, tantangan pemimpin Indonesia ke depan sangat berat. Peradaban akan segera bergeser ke zaman digital. Akan banyak pekerjaan dan keahlian yang diambilalih oleh teknologi digital. Sebagian tugas dan fungsi birokrasi pun akan diambilalih oleh teknologi digital. Bagi negara pascakolonial semacam Indonesia, tantangan tersebut tak mudah ditaklukkan. Tapi, tak mungkin juga menghindarinya.

Menurut saya, kata kuncinya adalah kolaborasi, sinergi. Watak teknologi yang mendominasi masa depan mensyaratkan kemampuan kolaborasi dan sinergi. Mari kita dorong terus-menerus pemimpin kita nanti mengembangkan kemampuan kita berkolaborasi, bersinergi. Kata Bung Karno, kemampuan bergotong royong.

*17 April 2019*

# 5

## Kebaya Kartini

**B**eberapa hari lalu Kang Gun, demikian saya menyapanya, berbagi kabar dan foto. Lewat WA. Tentang ritual *ngalungi sapi*. Saat saya menikmati perjalanan Banyuwangi - Jember bersama Pandanwangi malam. Kang Gun adalah tokoh Sedulur Sikep (*wong Samin*) dari Sukolilo, Pati, Jawa Tengah.

Kabar yang dikirim dibuka dengan syair gending “Pangkur” (Jawa): *Kartini Kendheng tan pegat// Ngelingake kang padha duwe janji// Mrih slamet pertiwiniipun// Kang paring sandhang boga....*

Kira-kira begini maknanya. Kartini Kendeng tidak pernah putus untuk mengingatkan kepada semua yang mempunyai janji. Demi keselamatan bumi pertiwi. Yang telah mencukupi sandang dan pangan.

Gending “Pangkur” juga mengawali ritual *ngalungi sapi*. Sebuah ritual merawat dan memandikan sapi. Yang dilakukan perempuan-perempuan petani Kendeng yang tergabung dalam JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng). Di Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Ritual itu sudah menjadi tradisi di sana. Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sapi atau kerbau menjadi salah satu hewan ternak yang membantu petani dalam proses bertani. Ritual *ngalungi sapi* memperlihatkan begitu erat hubungan antara manusia Kendeng dengan bumi beserta seluruh makhluk ciptaan-Nya. Tradisi adiluhung itu dipelihara, kata Kang Gun, untuk menjaga peradaban manusia. Manusia yang adil dan beradab akan tercipta jika memiliki rasa syukur pada Sang Maha Pencipta. Atas seluruh karya agung-Nya. Rasa syukur itu diwujudkan dengan cara menjaga kelestariannya secara terus menerus.

Saya membayangkan betapa asyik dan unik. Ritual *ngalungi sapi* oleh perempuan-perempuan Kendeng. Perempuan-perempuan itu berkebaya (lengkap dengan pasangan kain panjangnya) dan bertopi bundar khas petani. Mereka memandikan sapi. Hewan yang biasa diajak membajak lahan pertanian.

Bagi perempuan Kendeng, khususnya komunitas Sedulur Sikep, kebaya adalah pakaian sehari-hari. Baik di rumah, di lahan pertanian, maupun untuk urusan publik. Mereka merasa nyaman, aman, dan damai dengan tradisi berkebaya. Tak merasa ribet. Meski harus berjibaku dengan lumpur dan sapi di sawah.

Kebaya adalah identitas (busana). Persis R.A. Kartini. Selalu berkebaya. Meski berteman dengan perempuan-perempuan Belanda yang menawarkan gaya hidup (berbusana) baru. Kartini memakai kebaya ke mana-mana. Tak membuat langkahnya

gontai. Tak membuat pikirannya terpenjara. Pikiran Kartini tetaplah progresif. Bahkan pelopor kemajuan bagi kaum pribumi, khususnya perempuan.

Beberapa foto ritual *ngalungi sapi* yang dikirim Kang Gun membenarkan bayangan saya. Asyik dan unik. Sejumlah perempuan Kendeng memandikan sapi dengan berkebaya dan bertopi bundar khas topi petani. Sebenarnya *ngalungi sapi* telah menjadi tradisi tahunan. Tapi, makin unik dan bermakna karena diberi judul “Kartini Kendeng Ngalungi Indonesia”.

Beberapa perempuan lain yang juga berkebaya khas Kartini membawa poster. Poster itu berbunyi, “Siapa pun yang terpilih, kebutuhan pangan akan tetap dicukupi petani”. Di bawah teks tersebut gambar pasangan calon presiden-wakil presiden 01 (Joko Widodo dan Ma’ruf Amin) dan 02 (Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno). Lengkap dengan logo partai pendukung masing-masing pasangan. Persis yang ada di kartu suara pilpres 2019. Poster yang lain berbunyi, “Ketika petani Kendeng berjuang untuk kelestarian alam dan kedaulatan pangan, kalian di mana?” Di bawahnya ada gambar logo partai politik peserta pemilu 2019.

Saya terkesima. Luar biasa sekali tafsir perempuan-perempuan petani Kendeng. Terhadap sosok Kartini. Terhadap gerakan emansipasi perempuan. Terhadap kelestarian bumi sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup ciptaan Tuhan. Terhadap kehidupan sosial politik di tanah air menjelang pemilu 2019. Dengan tetap berkebaya. Yang memang menjadi identitas sehari-harinya.

Tafsir itu dekonstruktif. Membuyarkan pandangan saya selama ini. Mungkin juga pandangan masyarakat pada umumnya. Bak menerima kuliah teori kritis dengan topik tentang perempuan. Yang langsung disampaikan oleh Kartini dengan busana kebaya.

Sementara itu, kebaya Kartini bagi kita sekarang hanya semacam “*klangenan*”. Semata-mata memperingati. Setiap 21 April. Agar selalu ingat. Padahal kebaya itu identitas belaka. Bagi Kartini dan perempuan pada zamannya. Yang tetap dipertahankan oleh perempuan Kendeng dewasa ini. Saya khawatir hanya kebaya yang diingat tentang Kartini. Bukan semangat, pikiran, dan cita-citanya. Selebrasi penanda tanpa petanda.

*21 April 2019*

# 6

## Fajar Kebudayaan

**S**urat kabar *Medan Prijaji* terbit pada tahun 1907. Dekade awal abad XX. Berkat kerja keras Tirtoadhisoeserjo, seorang priyayi keturunan Bupati Bojonegoro yang menolak masuk *pangreh pradja* (pegawai pemerintah) dan memilih menerbitkan surat kabar.

Satu tahun kemudian Boedi Oetomo didirikan. Oleh seorang dokter bernama Wahidin Soedirohoesodo. Boedi Oetomo adalah organisasi pergerakan yang kelak didianggap sebagai “kebangkitan nasional”. Hari lahirnya, 20 Mei, lalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Apa hubungan antara *Medan Prijaji* dan Boedi Oetomo? Tidak ada. Tapi, dua lembaga tersebut merefleksikan fajar kebudayaan baru masyarakat Nusantara. Terutama kaum bumi-putra. Maka, kebangkitan nasional hakekatnya bukan sekadar

fenomena politik, tapi sekaligus kebudayaan. Fenomena yang mendasar sekali.

*Medan Prijaji* memang bukan satu-satunya surat kabar yang diterbitkan oleh kaum bumiputra. Tahun-tahun sebelumnya sudah terbit sejumlah surat kabar. Juga oleh kaum bumiputra. Meski kolaborasi dengan penerbit Indo dan Tionghoa. Tapi, *Medan Prijaji* menjadi menonjol, karena Tirtoadhisoejo mengembangkan gaya jurnalistik kritis. Penuh sindiran. Bermuatan kritik sosial. Maka, perkembangannya juga pesat. Kata Shiraishi, tiga tahun kemudian sudah punya 2.000 pelanggan.

Surat kabar adalah agen vital terbitnya kebudayaan baru awal abad XX. Dimulailah tradisi baru, tradisi keberaksaraan. Tradisi ini berangsur-angsur meninggalkan tradisi sebelumnya, tradisi kelisanan.

Dulu segala hal disampaikan secara lisan. Pewarisan kebudayaan, nilai, bahkan ilmu pengetahuan, dilakukan secara lisan. Orang menulis di atas daun lontar. Menulis dengan huruf Arab Pegon, Jawa, Bali, dan huruf lokal yang lain. Menulis masih menjadi kegiatan eksklusif dan personal.

Surat kabar menawarkan hal baru. Menulis menjadi kegiatan yang bersifat publik. Sengaja dilakukan untuk publik. Menggunakan huruf Latin dengan didukung mesin cetak. Melalui surat kabar, sesuatu dapat dengan cepat diketahui publik. Juga terdokumentasi dengan baik.

Karena itulah, surat kabar menjadi instrumen penting kebangkitan nasional. Senjata baru perlawanan terhadap kolonial. Setiap organisasi pergerakan menerbitkan surat kabar. Para tokoh pergerakan nasional menulis. Menjadi jurnalis di surat kabar yang diterbitkannya. Menyampaikan gagasannya melalui surat kabar itu. Masyarakat pun dapat dengan cepat mengetahuinya,



lalu mendiskusikannya dalam berbagai kesempatan. Di sana lah Indonesia dibayangkan, didiskusikan, lalu ditemukan.

Kaum bumiputera makin banyak yang tahu dan membayangkan tata kehidupan modern yang tak berdasarkan agama, suku, ras. Yang disebut “negara-bangsa” (*nation state*). Mereka pun mulai tahu kata *eksploitasi, penjajahan, pergerakan, boikot, mogok, partai, revolusi, kemerdekaan*, dan sejenisnya.

Tanah bumiputra bergerak. Makin bising. Seiring pergerakan modal yang makin membanjiri Nusantara. Seiring makin banyaknya surat kabar yang diterbitkan organisasi pergerakan. Seiring makin riuhnya diskusi publik tentang penjajahan kaum bumiputera.

Maka, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Idenburg, harus bekerja keras. Yang dihadapi bukan lagi perlawanan bersenjata yang bersifat lokal. Tapi, kebudayaan baru berupa nasionalisme yang menggelora. Yang dilembagakan dalam organisasi pergerakan nasional. Perlawanan baru kaum bumiputra terdidik dengan senjata baru pula. Yang sesungguhnya merupakan anak kandung kebijakan etis sang gubernur jenderal sendiri. “Kemanusiaan – tugas etis yang diembannya – ditantang gejala zaman. Zaman yang memilih arahnya sendiri bagai angin puyuh menerpa wajah kemanusiaannya. Berat. Berat bagi Idenburg...,” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam *Rumah Kaca*.

Kini, di dekade kedua abad XXI surat kabar memasuki usia senja. Dulu membuahkan fajar kebudayaan, kebangkitan nasional. Kini, surat kabar makin ditinggalkan.

Abad XXI ditandai oleh teknologi komputer. Bukan lagi mesin cetak yang menghasilkan surat kabar. Teknologi komputer lalu diikuti internet. Dengan segenap turunannya berupa media sosial. Dengan segenap variasinya. Sama dengan surat kabar pada awal abad XX, internet dengan segenap turunanannya pun akan membuahkan kebudayaan baru abad XXI.

Tentu sangat kompleks kebudayaan baru yang dibentuknya. Ambil satu saja yang ditimbulkan media sosial. Yakni, soal hoaks, berita tanpa fakta. Media sosial dengan segenap kecepatan dan kecanggihannya ternyata juga membuat manusia tak punya kesempatan dan kemampuan memastikan apakah informasi yang hadir hoaks atau faktual. Para ahli ilmu-ilmu sosial menyebutnya: *post-truth*. Sebuah keadaan tatkala antara *story* dan *history*, antara fiksi dan fakta, bercampur baur tak jelas batasnya.

Tanda makin kehilangan acuan. Kata makin tak bermakna. Apa yang oleh Baudrillard disebut “*simulacra*” makin membunyah memenuhi otak kita. Fakta makin tak berdaya. Kalah dengan emosi dan keyakinan personal. Jangan-jangan di era seperti ini kebangsaan pun terancam kehilangan rujukan. Kebudayaan baru yang timbul bukan menguatkan makna “kebangkitan” tapi justru mengarah pada makna “kebangkrutan”.

Dulu, awal abad XX melalui surat kabar batas primordialisme mencair dalam komunitas “bangsa” (*nation*). Di era *post-truth* saya melihat justru primordialisme potensial tumbuh kembali. Bermula dari dunia maya, lalu nyata. Terutama agama. Dan, sangat mungkin berkombinasi dengan ras/etnis. Sangat mungkin pula berkolaborasi dengan modal. Yang potensial mengancam persatuan/kesatuan.

Tapi, saya juga melihat fajar kebudayaan pada sisi yang lain. Yang cenderung positif. Internet dengan segenap turunannya juga membawa dampak demokratisasi. Terutama soal monopoli informasi (ilmu pengetahuan). Internet makin membuka akses informasi kepada siapapun. Di mana pun.

Informasi tidak lagi dimonopoli kalangan tertentu, lembaga tertentu. Sumber informasi meluas berkat internet. Untuk mengerti banyak hal, untuk menjadi top, tidak lagi bergantung pada pihak/ lembaga tertentu.

Tapi, fajar kebudayaan itu baru menyingsing. Entahlah sinar jelasnya nanti. Yang pasti kita tak mau “kebangkitan” berganti “kebangkrutan”.

*21 Mei 2019*



# 7

## Permusyawaratan

**P**idato Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 di antaranya menegaskan keutamaan permusyawaratan dalam sistem demokrasi. Pidato itu berisi penjelasan tentang norma dasar bernegara yang disebut Pancasila. “Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup,” tegas Bung Karno.

Mengapa? Di mata Bung Karno, demokrasi Barat hanya mengurus politik. Abai terhadap ekonomi rakyat. “Perancis mempunyai parlemen, Inggris mempunyai parlemen, Belanda mempunyai parlemen,... Tetapi di semua negeri modern itu kapitalisme subur dan merajalela! Di semua negeri modern itu proletar ditindas hidupnya, di semua negeri modern itu rakyat tidak selamat...,” teriak Bung Karno.

Demokrasi dilihatnya bukan dari cara memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut memerintah. Tapi, manfaatnya bagi rakyat secara keseluruhan. Demokrasi harus beriringan dengan nasionalisme. Yang timbul tidak karena “rasa” saja, tapi karena keadaan nyata masyarakat terjajah. Keadaan yang membangkitkan gelora, semangat, dan kesadaran bersama untuk bersatu menolak setiap tindakan yang menjadi sebab ketidakadilan dan kemiskinan. Agar tidak ada kaum yang tertindas, yang papa-sengsara. Singkatnya, demokrasi haruslah menyelamatkan rakyat, mengenyangkan perut rakyat, menyejahterakan rakyat.

Maka, Indonesia Merdeka tidak boleh mengikuti praktik demokrasi Barat. Yang hanya berkaki politik. Tanpa kaki ekonomi. Yang hanya menguntungkan kaum kapitalis seraya menepikan rakyat jelata. Bung Karno mewanti-wanti bahaya demokrasi tanpa demos, demokrasi model “mayorokrasi” dan “minorokrasi”.

Maka, sistem ketatanegaraan dipilih yang mengutamakan permusyawaratan. Dibentuk lah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang diberi kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Terlengkap. Anggotanya semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), plus utusan daerah dan golongan.

Dibayangkan sebagai penjelmaan rakyat, pengembalian kedaulatan rakyat. Penamaannya pun menggunakan kata *permusyawaratan*, yang menunjukkan betapa musyawarah menjadi nilai utama. Yang menyemangati kerja lembaga tersebut.

Sebagai wujud lembaga tertinggi, MPR diberi wewenang amat besar. Bukan hanya menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), tapi juga menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan mengangkat serta memberhentikan presiden.

Jelas sekali alur berpikir para pendiri negara. GBHN diciptakan sebagai perangkat menuntun penyelenggara pemerintahan –

dipimpin presiden – dalam mewujudkan tujuan bernegara. Presiden disebut “mandataris” (orang yang menerima mandat) MPR. Presiden tidak mengikuti pikiran dan kemauan sendiri. Tapi, menjalankan mandat yang diberikan MPR. Presiden harus tunduk dan menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Saya membacanya sebagai pelembagaan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia yang multikultur, yang kaya ragam, membutuhkan cara pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesatuan. Yang dituntut bukan hanya pemenuhan hak-hak individu dan kelompok. Melainkan juga kewajiban mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong), toleransi, dan kerukunan untuk kebaikan bersama.

Soekarno pun menegaskan pada Sidang Pleno Pertama Dewan Perancang Nasional (lembaga yang menyiapkan bahan GBHN yang disebut Pembangunan Semesta Berencana), 28 Agustus 1959. Kata Bung Karno, “... jikalau pola ini nanti sudah diterima oleh MPR, artinya jikalau pola itu sudah menjadi milik nasional, menjadi satu *national property*, menjadi satu *nationaal bezit*, maka pola itu harus diselenggarakan oleh segenap rakyat Indonesia agar supaya ia menjadi satu realitet.”

Itulah konsep negara permusyawaratan. Namun, arus politik pasca runtuhnya Orde Baru mengubah secara mendasar konsep tersebut. Demokrasi lebih menonjolkan hak individu rakyat. MPR pun diturunkan posisinya dari lembaga tertinggi menjadi lembaga yang setara dengan lembaga negara lain. Setara dengan DPR.

Juga dibuat DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Menggantikan utusan daerah dan golongan di MPR. Yang anggotanya dipilih langsung. Tapi, kewenangannya tak jelas. Tumpang tindih dengan DPR.

Kewenangan MPR dalam menyusun GBHN dan mengangkat presiden pun ditiadakan. Sebagai gantinya, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sebuah sistem yang tidak murah. Yang juga berpotensi besar mengancam keutuhan bangsa. Sebagaimana kita saksikan pada pemilu 2019 baru lalu.

GBHN digantikan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang ditetapkan dengan Undang-Undang. RPJPN diturunkan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahunan. Masalahnya, karena RPJPN ditetapkan oleh undang-undang, maka presiden terlibat dalam merumuskan, sekaligus menjalankannya. Karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada MPR, maka tidak ada pertanggungjawaban yang harus dibuat presiden kepada rakyat. Kecuali melalui mekanisme pemilihan umum lima tahunan. Di samping itu, presiden bisa saja tidak patuh kepada RPJPN, dan akan lebih mengikuti pikiran sendiri sesuai janji kampanye.

GBHN sangatlah penting dalam perspektif Pancasila. Kebijakan dasar pembangunan seyogyanya tidaklah diserahkan kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan mayoritas. Melainkan dirumuskan bersama melalui mekanisme musyawarah seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu lembaga terlengkap dan tertinggi. Agar presiden tidak mengembangkan politik sendiri, selera personal, tetapi menjalankan prinsip-prinsip yang ditetapkan MPR dalam suatu GBHN.

Tak perlu ada keraguan untuk mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN. Sudah seharusnya dalam versi yang lebih sempurna daripada produk GBHN masa Orde Baru. Sekaligus mengembalikan keutamaan permusyawaratan sesuai namanya.

Pun kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Bukankah UUD hasil amandemen sebenarnya masih menempatkan MPR



sebagai lembaga tertinggi meski secara terselubung? Presiden memang tidak lagi dipilih oleh MPR. MPR pun tidak bisa langsung menjatuhkan presiden tanpa melalui mekanisme *impeachment* yang memerlukan pengajuan DPR dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dalam ketentuan prosedur *impeachment* ternyata MPR-lah yang diberikan wewenang sebagai pemutus terakhir. Bisa atau tidak presiden dimakjulkan tetap ditangan MPR.

Sejarah tak pernah selesai. Senantiasa menunggu putra-putri terbaiknya. Semoga MPR hasil pemilu 2019 nanti berisi putra-putri terbaik itu.

1 Juni 2019



# Kesabaran Berujung Kemenangan

**P**apan reklame di pojok kampus Untag Banyuwangi bertajuk “Bulan Bung Karno”. Ada tiga hal penting di bulan Juni yang membuatnya disebut Bulan Bung Karno. Kelahiran Soekarno (6 Juni), pidato Soekarno di BPUPKI (1 Juni), dan kematian sang proklamator (21 Juni).

Tajuk di papan reklame itu rupanya menarik perhatian Pak Tua. Yang sebangku dengan saya di Pandanwangi malam menuju Jember tempo hari. Pak Tua membuka diskusi. Bukan mengomentari tajuk di papan reklame Untag, tapi langsung mengaitkannya dengan putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri. “Ibarat sekolah, Bu Mega itu lulus ujian. Dengan nilai istimewa,” kata Pak Tua, yang mengaku aktif membaca koran setiap pagi sejak muda. Saya mulai menyimak serius. Pak Tua pasti punya analisis. Rasa kantuk pun tiba-tiba sirna.

Dengan semangat Pak Tua melanjutkan. “Pikiran dan tindakan Bung Karno itu besar. Besar pula pengabdianya bagi bangsa. Tapi, hari-hari terakhir beliau tragis. Sangat memilukan. Terutama bagi keluarganya,” jelas Pak Tua sambil menarik napas panjang. Mukanya dilempar ke arah jendela kereta, di kegelapan malam. “Dan pengalaman pahit itulah modal awal Bu Mega, ketika beliau memilih jalannya sendiri, meneruskan pikiran dan tindakan besar ayahnya. Kesabaran Bu Mega teruji, yang membuatnya lulus sebagai pemenang sejati,” kata Pak Tua dengan mantap.

Saya manggut-manggut, mengamini. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, dinilai Pak Tua sebagai pemenang sejati. Berkat kesabarannya. Kesabaran berujung kemenangan. Inilah kira-kira tesisnya. Sebuah temuan genuin dengan perspektif yang unik. Yang memaksa saya merenungkannya berhari-hari.

Ternyata benar. Megawati Soekarnoputri bukan sekadar politikus. Dia adalah seorang ibu. Yang pengalamannya sangat lengkap dan panjang. Yang naluri keibuannya turut berbicara.

Terlahir dengan menyandang nama besar Soekarno, tokoh penting pergerakan kebangsaan Indonesia, proklamator dan presiden pertama Indonesia. Yang ajaran dan pemikirannya sangat *pro-wong cilik*. Namun, perjalanan Megawati terjal berliku. Megawati dimusuhi rezim Soeharto (Orde Baru). Ketika mulai memilih jalan politik untuk memuliakan pikiran dan ajaran ayahnya. Ketika mulai melembagakan pikiran dan ajaran Bung Karno di dalam partai politik asuhannya.

Megawati melawan kebijakan desoekarnoisasi yang dijalankan rezim Soeharto. Dengan langgam seorang ibu. Meski jalan yang dilaluinya terjal berliku, akhirnya sampai juga. Megawati menjadi presiden kelima di republik ini. Meski status pecundang pun harus pula diterimanya dalam dua pemilihan presiden langsung (2004 dan 2009).

Pengalaman tersebut mematangkan kepemimpinannya: “politikus model sang ibu”. Kesabaran menjadi kata kunci. Yang memadukan antara “otak” dan “hati”. Yang mendialektikan antara “realita” dan “idea”. Yang menghayati politik bukan sekadar pragmatisme memperoleh kekuasaan, tapi pelaksanaan prinsip keyakinan dan idealisme tertentu. Nilai-nilai substantif, seperti keadilan sosial, kemakmuran dan kedaulatan rakyat, tidak bisa direduksi menjadi sekadar alat maksimalisasi perolehan kekuasaan. Ujung dari politik memang kekuasaan. Tapi, kekuasaan haruslah menjamin pemenuhan nilai-nilai substantif. Maka, politik tak lain adalah manifestasi komitmen dan kecintaannya pada rakyat. Bagi politikus model sang ibu, politik itu menanam dan menumbuhkan. Mengasuh dan merawat. Bukan membatat.

Saya mencatatnya, ketika tempo hari bersama sejumlah rektor perguruan tinggi nasionalis beraudiensi dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP. Saat itu kami membahas isu radikalisme/fundamentalisme di lingkungan kampus. Tanpa saya duga, Megawati meminta kampus memikirkan cara mengatasi mereka yang sudah terpapar radikalisme. Bukan hanya berpikir untuk mereka yang belum terpapar. Yang sudah terpapar pun perlu dicari jalan keluarnya. Sebuah pandangan khas seorang ibu: mengasuh/merawat untuk keselamatan anak-anaknya.

Maka, bagi politikus model sang ibu, tak ada istilah “kalah”. Tak ada kata “lelah”. Jalan terjal berliku bukan untuk diratapi. Jalan itu dilakoninya dengan penuh kesabaran, kecerdasan, keteladanan, dan optimisme.

Megawati membuktikannya. Dia lah politikus perempuan Indonesia yang berhasil mencapai puncak kekuasaan (presiden). Dia lah politikus seangkatannya yang masih eksis dan sangat berpengaruh hari ini. Yang berhasil membangkitkan kader-

kadernya dari kekalahan. Yang berhasil mengantarkan partai politik asuhannya memenangi pemilu dua kali berturut-turut. Yang berhasil mempersembahkan kadernya menjadi presiden dua periode (saya yakin Jokowi dilantik Oktober nanti). Seperti kata Pak Tua, dia lah pemenang sejati.

Tapi, bagi pemenang sejati, kemenangan itu haruslah substantif. Bukan sekadar partai politik yang dipimpinya memenangi kontestasi. Bukan cuma kadernya memenangi pilpres. Dan, inilah yang hendak diingatkan, hendak diajarkan sang pemenang sejati. Bukan hanya kepada kader partai politik asuhannya. Tapi, bangsa Indonesia pada umumnya. Sepatutnya kita belajar darinya.

Mengelola Indonesia ke depan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Megawati tahu siapa musuh utama yang akan dihadapi jika negara betul-betul dikelola berdasarkan Pancasila. Megawati paham siapa yang akan marah bila bandul kekuasaan negara bergerak memihak kepentingan rakyat sebagaimana diajarkan ayahandanya.

Indonesia ke depan memang menghadapi problem yang tidak mudah dari sudut Pancasila. Sang pemenang sejati itu menyebutnya “kehilangan jejak sejarah” (*Kompas*, 7/01/2014). Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi realitas di banyak tempat. Korupsi dan bentuk-bentuk lain penyelewengan kekuasaan menjadi problem sistemik. Solidaritas sosial dan semangat gotong royong juga terasa melemah. Radikalisme, kekerasan dan konflik sosial yang beraroma agama/etnis menyeruak seiring masih lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan sosial. Reformasi pun belum menghasilkan yang substantif. Hanya hiruk-pikuk ritus politik pergantian kekuasaan. Para pemimpin saling menyandra, saling menggertak.

Berat, tidak mudah! Saya yakin sang pemenang sejati itu sedang berpikir keras. Berhitung serius. Bukan atas dasar “otak”

saja tapi juga “hati”. Bukan kalkulasi pragmatis, melainkan kalkulasi ideologis. Mengelola Indonesia membutuhkan kesabaran, manajemen kepemimpinan politik model sang ibu. Yang merawat dan mengasuh. Dan, pemenang sejati itu pun tahu kapan akan keluar gelanggang.

*20 Juni 2019*





# Kapitalisasi Penanda

**P**ak Tua yang sebangku dengan saya di Probowangi siang itu ikutan sewot. Berawal dari kolom Samsudin Adlawi di *Radar Banyuwangi* (2 Juli 2019). Yang berjudul “Menudinglah dengan Benar”. “Saya setuju tulisan ini,” katanya sambil menunjuk tulisan Mas Adlawi. Pak Tua melanjutkan, “Lha yang di medsos itu jelas *ngawur*, Mas. *Mosok* Pulau Santen yang gitu aja dianggap Arabisasi Banyuwangi.”

Saat itu saya menanggapi sekenanya. “Pak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata saat membuka pameran lukisan di kampus Untag juga menyinggungnya, Bapak. Menurut Pak Kadis, Pulau Santen itu hanya strategi marketing. Tidak ada Arabisasi seperti tulisan di medsos yang rame itu,” kata saya mengutip Pak Bramuda. Tapi, Pak Tua rupanya punya teori yang memancing saya lebih serius. “Lha ya, apa model wisata halal, pantai syariah, seperti

itu bisa diartikan Arabisasi? Meng-Arab-kan Banyuwangi yang penduduk aslinya orang Osing? Bahaya sekali memaknai seperti itu. *Mosok* mau menyingkirkan Osing? *Ngawur* itu,” tegas Pak Tua.

Saya mencoba memahami logika Pak Tua. Dengan batuan semiotika (ilmu tanda). Dedengkot semiotika, **Ferdinand de Saussure**, mengajarkan bahwa setiap tanda terdiri atas “penanda” (*signifiant/signifier*) dan “petanda” (*signifie/signified*). Menurut pemikir asal Perancis itu, keduanya tak terpisahkan sebagai komponen pembentuk tanda.

Penanda merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran manusia melalui indera. Seperti citra bunyi, bahasa, gambaran visual. Saat kita melihat perempuan berhijab, atau pria bersorban, pikiran akan segera tertuju pada kategori manusia yang memeluk ajaran Islam. Di Indonesia dinamai dengan rangkaian bunyi /m-u-s-l-i-m/. Maka, secara semiotik, berhijab/bersorban dan kata *muslim* adalah penanda. Saat tubuh kita terasa panas, dokter akan bilang kurang sehat. Tubuh yang terasa panas adalah penanda.

Lalu, apa petanda? Menurut **Saussure**, petanda adalah kesan yang ada dalam pikiran terhadap apa yang tertangkap indera. Saat kita melihat orang berhijab/bersorban, atau mendengar kata *muslim*, pikiran akan tertuju pada ‘manusia yang memeluk ajaran agama Islam’. Itulah petanda. Tubuh terasa panas menandai ‘tubuh kurang sehat’ (petanda).

Tapi, kata Saussure, relasi antara penanda dan petanda bersifat manasuka. Sesuai perjanjian. Penanda bisa berbeda untuk petanda yang sama. Ada *pintu* (Indonesia), *lawang* (Jawa), dan *door* (Inggris) untuk menandai ‘sesuatu yang menghubungkan ruang yang satu dengan ruang yang lain’. Petanda yang berbeda bisa pula dihadirkan melalui penanda yang sama. Semisal kata

*jancuk*. Bisa menandai ‘umpatan, kemarahan’, tapi bisa pula menandai ‘keakraban, kegembiraan’. Relasi itu juga dinamis. Bergantung pada konteks: tempat, waktu, situasi. Bahkan dinamika relasi penanda dan petanda bisa pula karena kekuasaan. Baik politik maupun ekonomi.

Maka, secara semiotik, saya mengamini Pak Tua. Rasanya tak ada potongan Pak Anas, Bupati Banyuwangi, melakukan Arabisasi di Banyuwangi. Secara semiotik, saya tak menemukan penanda yang bisa dimaknai ‘meng-Arab-kan Banyuwangi melalui kebijakan pariwisata’. Meskipun di Pulau Santen, yang disebut “pantai syariah”.

Saya hanya melihat sebuah pengembangan destinasi wisata dengan konsep wisata halal. Ada yang menyebut wisata syariah. Sebuah konsep wisata dengan sejumlah fasilitas yang diklaim bersifat halal. Seperti, makanan halal, tidak menjajakan alkohol, pemberitahuan waktu jelang beribadah (azan), tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempat ibadah, serta fasilitas berkonsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Secara semiotik, itu semua adalah penanda-penanda.

Lalu, menandai apa? Harus dilihat secara intertekstualitas. Tidak sulit. Taruh Pulau Santen di antara destinasi wisata lain di Banyuwangi. Taruh juga di antara aktivitas kebudayaan masyarakat Banyuwangi. Baik yang mendapat sentuhan pariwisata maupun yang lain. Akan tampak petanda apa yang hadir di sana.

Yang saya lihat, petanda yang hadir sangat jauh dari pengertian Arabisasi. Sangat jauh dari tendensi meng-Arab-kan masyarakat Banyuwangi, yang penduduk aslinya Osing. Tak ada marginalisasi Osing. Saya hanya melihat tendensi kapitalisasi penanda yang diklaim bersifat syariah. Menjajakan penanda-penanda khas kaum muslim. Untuk apa? Demi fulus.

Lalu, apakah Pulau Santen dengan penanda-penanda syariah itu menolak pengunjung non-muslim? Tentu tidak. Sepanjang berfulus. Sepanjang mau mengonsumsi penanda-penanda khas muslim itu. Yang pasti, Pulau Santen tak akan ramah kepada pengunjung tak berfulus. Meskipun muslim.

Tak ada yang aneh di tengah pusaran ekonomi global dewasa ini. Yang dipandu genderang neoliberalisme. Yang sebagian digerakkan oleh industri wisata dunia. Yang sebagiannya dari negeri (masyarakat) muslim. Penanda telah pula menjadi komoditas. Saat saya bertamu di kampus Rajamangala University of Technology Krungthep, Thailand, saya pun sempat ditunjukkan program pengembangan makanan halal di kampus itu. Apa urusan kampus di negeri mayoritas non-muslim itu mengembangkan makanan halal? Tak beda dengan Pulau Santen. Kapitalisasi penanda demi fulus.

Pak Tua di Probowangi siang itu sempat mengingatkan saya. Menjelang saya turun di stasiun Jember. Katanya, “Mas, kan Pak Anas itu bupati yang jago pemasaran. Paham betul potensi Banyuwangi yang laku jual. Dan tahu cara menjualnya.” Sambil tersenyum, saya manggut-manggut. Saya mohon pamit Pak Tua. Tapi, pesannya mengingatkan saya kembali pada gagasan cerdas yang pernah saya dengar dari Pak Anas. Tentang rencana pengembangan Pulau Tabuhan. Yang menjajakan penanda-penanda yang berbeda dengan Pulau Santen. Mungkin mirip Nusa Lembongan (Bali), atau Gili Trawangan (Lombok). Fulus juga ujungnya. Entah kapan.

*10 Juli 2019*

## Gaya Hidup dan SDM

Istri saya terkejut. Tapi, memahami. Dua mahasiswi Spanyol yang berdiam di rumah saya menolak hidangan yang disuguhkannya. Hidangan apa? Krupuk. Ya, krupuk, jenis makanan yang selalu dicari orang Indonesia saat makan pagi/siang/malam. Tanpa krupuk, makan terasa kurang nikmat.

Tapi, dua mahasiswi anggota organisasi internasional untuk para pemuda/mahasiswa yang fokus pada pengembangan kepemimpinan (AIESEC) itu menolak menyantapnya. Mengapa? Krupuk bundar warna merah yang dibeli istri saya di pasar tradisional itu dipandang mengandung zat pewarna yang tak baik buat kesehatan. Memang warna merahnya cukup tajam. Di permukaan krupuk tampak beberapa bintik merah yang tajam sekali. Padahal jenis krupuk tersebut termasuk paling disukai

konsumen. Termasuk keluarga saya. Rasanya gurih, dan renyah. Bahkan anak saya sering menjadikannya camilan.

Apakah saya dan keluarga tidak tahu bahwa krupuk itu kemungkinan menggunakan zat pewarna yang tidak baik buat kesehatan? Tahu. Tapi, itulah kenyataan. Itulah cara kita ber\_konsumsi. Itulah selera. Itulah gaya hidup. Ternyata pengetahuan yang saya miliki baru sekadar menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu belum mengarahkan tindakan saya. Belum menjadi tuntunan. Pengetahuan itu belum membentuk selera, gaya hidup, kebudayaan. Pengetahuan memang tidak sertamerta mengarahkan tindakan. Pengetahuan membutuhkan enkulturasi agar menjadi tuntunan.

Beda dengan dua mahasiswi Spanyol tersebut. Pengetahuan yang mereka miliki telah mengarahkan cara mereka berkonsumsi. Pengetahuan itu telah membentuk selera. Pengetahuan telah mengonstruksi gaya hidup mereka. Pengetahuan itu telah membudaya.

Peristiwa di meja makan itu sepertinya remeh-temeh. Soal kecil. Hanya urusan krupuk. Tapi, merefleksikan soal besar dan urgen. Yang berujung pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

Maka, saya setuju Presiden Jokowi. SDM bukan hanya urusan lembaga pendidikan. Pembangunan SDM harus dimulai sejak seseorang di dalam kandungan sang ibu. Bahkan sudah sejak lama temuan antropologis memperlihatkan. Sudah sejak zaman kuna masyarakat memiliki kearifan lokal berupa larangan inses. Yakni, larangan melakukan perkawinan dengan saudara dekat. Masyarakat memiliki aturan sampai generasi mana larangan inses berlaku. Meski tak sama antara masyarakat satu dengan lainnya. Saya kira larangan inses itu erat kaitannya dengan kualitas SDM. Perkawinan yang terlalu dekat secara kekerabatan beresiko kecacatan bagi keturunannya.

Saat berpidato di Sentul International Convention Center (SICC) pada 14 Juli 2019, Presiden Jokowi menyampaikan arah

pembangunan SDM. Kata Jokowi, pembangunan SDM harus dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak sekolah.

Benar sekali. Harus diupayakan anak-anak yang akan memasuki bangku sekolah adalah anak-anak yang sehat. Sehat bukan hari itu saja. Sehat ini harus dilihat dalam jangka panjang. Sebutlah “potensi sehat”.

Anak-anak kita haruslah berpotensi sehat dalam jangka panjang. Seluruh organnya tumbuh optimal. Agar kecerdasannya juga tumbuh optimal. Yang memang berbeda satu orang dengan orang lain. Ada yang hebat di kecerdasan matematik, tapi kurang di kinestetik atau kecerdasan yang lain. Hebat di kecerdasan linguistik, tapi lemah di kecerdasan interpersonal atau yang lain. Potensi sehat akan menjamin pertumbuhan kecerdasan-kecerdasan tersebut dalam jangka panjang. Menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan-kecerdasan itulah tugas lembaga pendidikan.

Kita tentu tak ingin punya generasi yang layu sebelum berkembang, generasi yang sudah loyo saat usia produktif. Jangan lahirkan generasi yang berpotensi kehilangan masa kecemerlangannya. Karena salah urus. Karena digerogeti oleh penyakit degeneratif.

Maka, negara harus memastikan. Harus *cawe-cawe*. Gaya hidup bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bukan sesuatu yang final. Gaya hidup itu bentukan, bikinan. Gaya hidup adalah konstruksi sosial. Di sana berkelindan kepentingan-kepentingan. Termasuk kepentingan bisnis. Besar maupun kecil.

Gaya hidup pastilah berubah. Maka, negara haruslah hadir. Negara tidak boleh berpangku tangan. Negara sangatlah berkepentingan. Jangan biarkan gaya hidup masyarakat di-konstruksikan dengan model pasar bebas. Jangan lepaskan gaya hidup sebagai arena kompetisi para agen tanpa visi jangka panjang tentang kualitas SDM.

Saya melihat bahwa masyarakat kita sekarang ini dikepeng oleh produk-produk industri makanan dan gaya hidup yang kontraproduktif bagi kualitas generasi dalam jangka panjang. Bahkan berdimensi struktural. Sebagai konsumen, masyarakat kalangan bawah paling tak berdaya. Paling menderita. Istri saya sering menjumpai murid-murid di sekolahnya ternyata telah terbiasa mengonsumsi penyedap rasa masakan, seperti Royco atau Masako, sebagai camilan. Bila musim mangga tiba, mereka sering menikmati mangga muda (*pencit*) dengan penyedap rasa tersebut. Tak banyak pilihan bagi mereka. Mereka memang miskin: ya miskin materi, ya miskin pengetahuan.

Maka, negara harus memastikan. Gaya hidup warganya yang terus berubah dan berkembang haruslah menjamin kualitas suatu generasi. Gaya hidup itu haruslah menjamin kesehatan generasi dalam jangka panjang.

Saya sangat setuju visi Presiden Jokowi tentang SDM. Saya membayangkan suatu hari kelak ada kebijakan “wajib minum susu” pasca-ASI (air susu ibu). Seperti kebijakan “wajib belajar” (12 tahun). Maka, akan dibutuhkan banyak pabrik susu. Akan dibutuhkan banyak usaha peternakan sapi atau kambing. Akan dibutuhkan banyak usaha pakan ternak sapi atau kambing. Bisa dibayangkan dampak ikutannya. Secara ekonomi dan ketenagakerjaan. Tentu sangat besar.

Mungkin nanti juga perlu kebijakan edukasi tentang konsumsi garam dan gula. Atau, bahkan regulasi terkait konsumsi garam dan gula bagi industri makanan. Gaya hidup sehat niscaya menghasilkan SDM berkualitas.

25 Juli 2019



# Kado Istimewa

Saya sangat senang. Bangga sekali. Betapa tidak! Peringatan Hari Kemerdekaan RI kali ini sungguh bermakna. Bagi kampus kami, yang juga populer disebut kampus merah-putih. Yang inspirasi pendirian dan penamaannya pun berasal dari peristiwa bersejarah: 17 Agustus 1945. Sebuah peristiwa hebat. Penuh daya juang. Bukan hanya bermodal semangat, tekat. Tapi, juga kecerdasan. Yang mensinergikan daya imajinasi dan ilmu pengetahuan. Yang membuahkan kreativitas tinggi. Yang ujungnya adalah kemerdekaan.

Apa yang saya maksud sungguh bermakna bagi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi? Tak lain adalah kiprah anak-anak Untag Banyuwangi. Sangat mengejutkan. Tak disangka-sangka. Saya acungi tiga jempol. Apa itu? Sejumlah mahasiswa

Untag Banyuwangi berhasil menembus dominasi kawan-kawannya dari perguruan tinggi (PT) papan atas di Indonesia. Mereka berhasil melenggang ke forum akademik paling akbar dan bergengsi untuk mahasiswa di Indonesia. Yakni, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-32 di Denpasar, 27 – 31 Agustus 2019. Sebanyak 3 (tiga) tim. Terbanyak kedua untuk PT swasta di Jawa Timur. Sepuluh besar PT negeri dan swasta di Jawa Timur. Jumlah yang sangat mewah bagi PT kecil semacam Untag Banyuwangi.

Bagi saya, kiprah mereka adalah kado istimewa. Buat kampusnya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74. Yang membuat saya harus menulis catatan ini. Yang mencoba melihat kiprah mereka pun dalam cakrawala kemerdekaan. Bukan hanya sebagai wujud penghormatan saya atas capaian anak-anak. Tapi, juga mengabarkan kepada khalayak. Siapa tahu makna itu juga memberikan hal positif bagi khalayak.

Saya patut bangga dan hormat. Tidak mudah untuk sampai panggung PIMNAS. Butuh daya juang tinggi. Semangat dan tekak kuat. Perlu kecerdasan. Untuk menyatukan daya imajinasi dan ilmu pengetahuan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Harus bekerja sama, sinergi, kolaborasi. Kata Bung Karno, gotong royong. Di antara mereka. Juga dengan institusi.

Proses menuju PIMNAS memang panjang. Terasa melelahkan. Pun menuntut kesabaran. Diawali dari kompetisi tingkat proposal hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Terdiri atas program penelitian (PKM-P), pengabdian masyarakat (PKM-M), penerapan teknologi (PKM-T), karsa cipta (PKM-KC), kewirausahaan (PKM-K), gagasan tertulis (PKM-GT), gagasan futuristik konstruktif (PKM-GFK).

Kompetisinya sangat ketat. Dari tahun ke tahun. Jumlah proposal tahun 2019 mencapai 51.000 lebih. Angka itu sudah melalui pembatasan. Setiap PT dijatah. Berdasarkan klasternya. Kalau tidak dijatah, mungkin bisa tembus 75.000 proposal.

Dari 51.000 proposal, hanya didanai 3.621 proposal. Dari angka ini tampak keketatan kompetisinya. Tim yang didanai lalu mengerjakan programnya. Selama 3 – 5 bulan. Dipantau oleh pembimbing/pendamping. Juga oleh tim pemonev internal dari PT masing-masing. Lalu, menjelang program berakhir dimonitoring dan dievaluasi oleh tim pemonev eksternal. Yang dibentuk oleh pemberi hibah. Lalu ditetapkanlah tim mana yang lolos PIMNAS.

Untuk PIMNAS ke-32 nanti diundang sebanyak 460 tim. Mereka dari 126 PT seluruh Indonesia, negeri maupun swasta. Tiga di antara 460 tim itu adalah anak-anak Banyuwangi, pewaris etos Prabu Tawang Alun, Kerajaan Blambangan. Mereka akan tampil di kelas PKM-P (2 tim) dan PKM-GFK (1 tim). Terpilih dari 9 tim yang mendapatkan pendanaan (6 PKM-P, 1 PKM-M, 1 PKM-K, dan 1 PKM-GFK).

Saya bilang hebat. Tanpa menunggu apakah nanti mendapatkan medali di PIMNAS, bagi saya, mereka sudah menjadi pemenang. Mereka adalah inovator muda. Yang mulai belajar membiasakan diri menguji gagasan dengan standar akademik ketat. Anak-anak muda yang berpikir dan melihat realitas tidak biasanya, *out of the box*. Realitas dibaca secara kritis dan kreatif. Bukan dilihat sebagai warisan yang harus diterima begitu saja, yang tak bisa diubah. Realitas dipahami sebagai konstruksi, bikinan, secara sosial. Bisa diubah. Maka anak-anak muda itu prospektif sebagai pembuat sejarah, pengubah kebudayaan.

Di mata saya, tidak berlebihan bila krida anak-anak PIMNAS ditaruh dalam cakrawala kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan

pada hakekatnya adalah sejarah pemikiran kritis dan kreatif. Kemerdekaan adalah karya. Buah pemikiran kritis dan kreatif. Pejuang kemerdekaan adalah orang-orang yang kritis dan kreatif, yang *out of the box*. Yang mampu mensinergikan daya imajinasi dan ilmu pengetahuan. Guna menemukan realitas lain di luar realitas yang mereka pijaki. Realitas penjajahan mereka tolak. Mereka lalu membayangkan realitas lain yang lebih baik.

Hasilnya luar biasa. Mereka menemukan bangsa Indonesia. Bukan lagi bangsa Jawa, Madura, Sunda, dan seterusnya. Mereka memilih bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa, Madura, Sunda, dan sebagainya. Tapi, Jawa, Madura, Sunda, dan sukubangsa serta bahasa daerah lain tetap diberi tempat. Justru buat memperkaya khasanah Indonesia.

Mereka menetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan lagi kerajaan lokal yang terpecah-pecah. Mereka menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Bukan paham-paham lain yang dianggap tidak cocok. Lalu mereka memproduksi teks proklamasi kemerdekaan. Teks itu dibaca oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945.

Karya-karya agung itu tak akan lahir tanpa pemikiran kritis dan kreatif. Tak akan muncul tanpa sinergi antara imajinasi dan ilmu pengetahuan.

Masa depan anak-anak PIMNAS itu masih panjang. Masih banyak rintangan menghadang. Tapi, mereka telah berjejak. Mereka membuktikan. Dengan daya juang tinggi, lalu sinergi imajinasi dan ilmu pengetahuan, karya jempolan itu lahir. Sebuah kado istimewa buat negeri. Dirgahayu Republik Indonesia.

17 Agustus 2019

# 12

## Petani Kok Miskin?

**P**ak Tua di Probowangi Sabtu sore kemarin mirip Pak Marhaen. Kurus kerontang. Kulitnya legam akibat sengatan matahari. Tangan dan kakinya tampak kasar. Raut mukanya berkerut tajam. Tampak jauh lebih tua dari usianya. Siapapun yang melihat akan segera berkesimpulan: miskin.

Siapa Pak Marhaen? Dia adalah sosok petani temuan Bung Karno pada zaman kolonial (1927). Sangat miskin. Padahal, Pak Marhaen menggarap tanahnya sendiri. Pak Marhaen juga memiliki cangkul sendiri. Dia juga memiliki alat produksi yang lain. Tapi, tetap saja miskin. Hidup sengsara.

Berbeda dengan kaum buruh temuan Tuan Marx. Mereka pun miskin. Tapi, karena buruh tak menguasai alat-alat produksi. Bahkan buruh dikategorikan faktor produksi dalam ilmu ekonomi modern. Buruh juga tak menikmati nilai lebih kerjanya.

Pak Marhaen mewakili sosok rakyat Hindia-Belanda. Miskin dan sengsara. Dimiskinkan dan disengsarakan oleh sistem kolonialisme/imperialisme. Kata Bung Karno, karena kemiskinan dan kesengsaraan yang tak tertahankan, banyak rakyat jajahan minta dibui saja. "Di bui masih kenyang makan, sedang di luar belum tentu sekali sehari..." demikian Bung Karno menjelaskan.

Pak Tua di Probowangi itu juga petani. Juga punya lahan. Tapi, tak sampai 0,5 ha. Juga punya cangkul dan bajak. Bercocok tanam bahan pangan. Tapi, hasilnya, kata Pak Tua, tak pernah cukup untuk mengangkat nasibnya. Bahkan tak jarang merugi.

Apalagi sekarang. Pak Tua mengeluh, ongkos produksi makin mahal. Lahannya butuh perlakuan yang makin mahal. Sawahnya makin manja. Kebutuhan pupuk makin banyak. Kebutuhan air makin banyak. Harus diobat. Makin banyak. Tanpa diobat, akan habis diserang hama. Barangkali akibat "revolusi hijau" yang dipaksakan sejak dekade 1970-an. Tapi, hasilnya? Pak Tua memandang ke arah jendela kerata api Probowangi sore itu tanpa menjelaskannya. Tiba-tiba dia menatap saya seraya berucap, "Miskin itu mungkin sudah takdir petani ya...?"

Saya catat langsung ucapan Pak Tua itu di gawai saya. Jangan-jangan benar. Semua manusia butuh makan. Jumlahnya makin banyak. Hewan piaraan manusia pun butuh makan. Jumlahnya juga makin banyak. Bukankah bahan makanan manusia dan hewan piaraannya dihasilkan dari kerja petani?

Bila kerja petani senantiasa dibutuhkan, dengan jumlah yang makin banyak, mestinya tidak miskin dan sengsara. Mestinya petani hidup layak dan sejahtera. Tapi, petani *kok* miskin dan sengsara? Apakah kerjanya tak pantas dihargai yang tinggi? Karena mereka pada umumnya bukan produk pendidikan tinggi? Karena kita tak mau harga pangan mahal? Apakah memang

harus ada kurban sosial agar pangan tetap murah? Dan, kurban itu bernama Pak Tua (dan golongannya).

Ucapan Pak Tua itu sepertinya telah menjadi tesis abadi. Tak runtuh-runtuh. Bung Karno dan sejumlah tokoh berjuang meruntuhkannya. Meruntuhkan dengan memerdekakan rakyat jajahan. Meruntuhkan dengan membentuk negara merdeka. Meruntuhkan dengan membentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila. Meruntuhkan dengan membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial.

Dibuatlah UUD 1945. Dibuatlah peraturan dasar di bidang agraria (Undang-undang 5 Tahun 1960) yang menggantikan peraturan agraria buatan penjajah (*Agrarische Wet* 1870). Yang pengesahannya diperingati sebagai Hari Tani Nasional, 24 September. Lalu, didirikan pula fakultas yang mengurus soal pertanian di banyak perguruan tinggi.

Tapi, masih saja muncul sosok Pak Tua. Yang mirip Pak Marhaen. Miskin dan sengsara. Dan, karena itu pula, bertani dijauhi oleh generasi sekolahan dewasa ini. Fakultas Pertanian pun sepi. Ogah menjadi petani.

Sore itu Pak Tua benar-benar menohok saya. “Tapi, saya ikhlas, Mas. Senang sawah saya masih tumbuh padi. Masih mau ke sawah. Kan repot nanti kalau petani gak mau *nyawah*,” ujar Pak Tua seraya tersenyum tipis. Ujaran yang penuh kritik, sekaligus berbobot politis. Karena posisi sosialnya, petani memang kerap dibawa dalam urusan politis. Bahkan literatur klasik tentang petani kerap mengaitkannya dengan gerakan revolusioner. Tapi, nyatanya tesis “petani *kok* miskin” tak runtuh-runtuh.

Pak Tua adalah fenomena. Seperti juga Pak Marhaen yang ditemukan Bung Karno. Bagi kita tentu sangat genting. Bukankah kita dikaruniai alam semesta melimpah, mestinya juga menjamin kesejahteraan para petani? Bila kerja petani adalah pangkal dari

kecukupan pangan, mestinya mereka terhindar dari kemiskinan dan hidup sengsara.

Kemiskinan dan kesengsaraan Pak Tua di Probowangi sore itu menegaskan satu hal. Betapa petani hingga hari ini masih terasing dari kerjanya. Terasing dari tanahnya. Dari cangkul dan bajaknya. Mereka bertani dengan alat-alat produksinya sendiri. Tapi, tak tahu hakekat yang dihasilkan. Mereka menanam apa, ke mana, dan berapa nilainya, sesungguhnya petani tak tahu. Mereka terasing dari keringatnya.

Bila kerja petani adalah pangkal manusia hidup, petani haruslah hidup. Bukan terpaksa hidup. Negara haruslah menjaminnya. Jangan asingkan petani dari kerjanya, dari keringatnya.

*25 September 2019*



## Mi Setan Haram?

**P**ak Tua di sebelah saya terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Terkesan melihat sesuatu yang aneh dari gawainya. Ternyata berita berjudul “MUI Sumbar Haramkan Produk Makanan Bernama Setan”. Berita di [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com).

Di artikel itu MUI Sumatra Barat mengharamkan pelabelan produk makanan/minuman dengan menggunakan kata *setan*, *iblis*, *neraka*. Yang berbau seksi seperti *ayam dada montok* diberi status makruh. MUI Sumatra Barat juga mengimbau agar masyarakat tak mengonsumsi produk berlabel haram itu.

“Ada-ada saja,” kata Pak Tua. “*Lha* di Surabaya itu ada *rawon setan* yang sudah puluhan tahun,” terang Pak Tua yang mengaku penggemar *rawon setan* di Jalan Embong Malang, Surabaya. Juga mengaku menyukai kue *kontol kambing*.

Kuliner Indonesia memang penuh kreasi. Macamnya, pun penamaannya. Di dekat tempat tinggal saya di Jember ada kedai

makan yang menjajakan *ayam galau*. “Ayam kok galau?” komentar spontan bungsu saya lima tahun lalu saat pertama kali kami menikmatinya.

Yang paling populer: *mi setan*. Mungkin ada di setiap kota di Indonesia. Di Banyuwangi ada pula *mi nyonyor*. Kreasi Mas Ago, alumni Untag Banyuwangi. Yang gerainya juga sudah hadir di sejumlah kota.

Nama-nama unik lain yang lagi tren, seperti *bebek galak*, *bakso granat*. Di Malang saya pernah menyantap *nasi goreng ngeri* di ujung Jalan Bandung.

Nama-nama tersebut unik. Hubungan antara kata dan hal yang ditandai juga unik. Bukan arbitrer sebagaimana umumnya bahasa. Biasanya nama makanan berupa kata tunggal dan gabungan kata. Misalnya, *sup* (kata tunggal), *sup buntut* (gabungan kata).

Yang gabungan kata terdiri atas unsur inti dan penjelas. Keduanya berhubungan langsung membentuk kesatuan makna. Unsur inti menunjuk jenis makanan. Unsur penjelas menandai kekhasannya.

*Sup buntut*, misalnya, adalah sup yang berbahan buntut sapi, dan ini berbeda dengan *sup ayam* ‘sup berbahan daging ayam’. Banyak jenis soto, yang kekhasannya ditandai kata penjelasnya. Banyak pula jenis mi. Seperti *mi ayam*, *mi kocok*, *mi pangsit*, *mi bakso*. Kekhasannya juga ditandai kata penjelasnya.

Penamaan *mi setan*, *ayam galau*, *bakso granat*, *nasi goreng ngeri*, *bebek galak* terkesan kurang lazim. Kata *setan*, *galau*, *granat*, *ngeri*, *galak* sebagai penjelas tidak berhubungan langsung dengan unsur inti.

Kata-kata tersebut mengacu pada sesuatu di luar inti. Pembentukan kesatuan makna berlangsung secara asosiatif. Dinamakan *mi setan*, karena jenis mi ini sangat pedas (bertingkat).

Orang yang menyantapnya dijamin kesetanan, karena rasa yang sangat pedas. Berbeda dengan *rawon setan* di Jalan Embong Malang, Surabaya. Kata *setan* berasosiasi dengan ‘waktu malam dan gelap’. Konon, warung rawon kreasi Mbah Musiati itu mulai buka di tengah malam. Maklum, warung Mbah Musiati awalnya hanya melayani para pekerja malam.

Dinamakan *ayam galau*, karena jenis makanan berbahan daging ayam (bakar/goreng) itu membuat galau. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *galau* berarti ‘kacau tidak keruan (untuk pikiran)’. Sehabis menikmati *ayam galau* Anda dijamin galau. Akibat rasa pedasnya.

Disebut *bakso granat*, bukan bakso yang berbentuk granat ‘senjata peledak yang dilemparkan’. Melainkan bakso yang bisa meledak. Ah, bakso bisa meledak? Ya, karena di dalam bulatan bakso diberi potongan cabai. Orang yang mengunyahnya akan merasakan sensasi ledakan granat di dalam mulutnya. *Nasi goreng ngeri* memang menakutkan. Karena tingkat kepedasannya. *Bebek galak* pun begitu. Rasa yang amat pedas itu diasosiasikan dengan ‘buas, ganas, garang’ yang merupakan komponen makna kata *galak*.

Dulu, sebelum zaman pasar, cara asosiasi juga dipakai. Tapi, sebagai penanda semata. Bila Anda mendengar kue *kontol kambing* atau *pelel kipu* jangan berpikiran jelek dulu. Kue *kontol kambing* memang bentuknya menyerupai kelamin kambing jantan. Berbahan kacang hijau. Dibuat sedemikian rupa sehingga mirip kelamin kambing jantan. Demikian pula kue *pelel kipu*. Di beberapa daerah disebut *manco*, *getas*. Terbuat dari ketan. Berbentuk mirip kelamin laki-laki.

Di zaman pasar ternyata citarasa pedas bisa dijual. Melalui kreasi bahasa. Bukankah orang Indonesia banyak yang suka pedas? Di Banyuwangi paling gampang menemukan *sego tempong*.

Yang juga menjual citarasa pedas. Sehabis menyantap *sego tempong*, muka bagaikan kena tampar. Karena sambalannya yang amat pedas.

Saya bisa mengerti mengapa Pak Tua yang sebangku dengan saya di kereta api Logawa tempo hari terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Kini penamaan produk makanan/minuman ternyata bukan sekadar penanda. Keunikannya bermotif dagang.

Maka, jangan kaget bila suatu saat saya membuka Kedai Serba Galau. Menunya: *mi galau*, *sup galau*, *soto galau*, *rawon galau*, dan makanan galau lain. Atau, Kedai Dada Montok. Menjajakan ayam dan bebek bakar/goreng/kukus. Khusus daging bagian dada. Bukankah dada ayam dan bebek selalu montok?

Begitulah zaman komodifikasi pasar. Bahasa pun bernilai pasar. Kapitalisme sembunyi di balik bahasa. Sampai kapan? Entahlah! Mungkin sampai muncul kreasi baru. Setelah kreasi lama tak laku. Dan, kreasi baru itu bisa pula berwajah Tuhan. Yang pasti kedai *mi setan* dekat rumah saya masih dibanjiri pengunjung. Mungkin banyak yang masih ketagihan “kesetanan”.

16 Oktober 2019

# Nadiem, Sabarlah...

**P**ikiran dan hati saya *wurung ambyar*. Probowangi Sabtu sore kemarin mempertemukan saya dengan Pak Tua. Dia bijak. Juga bernas. Punya cara mengusir kegalauan saya.

Rabu lalu anak muda brilian nan kaya, Nadiem Makarim, diamanahi Presiden Joko Widodo. Memangku jabatan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud). Pendidikan tinggi, yang menjadi dunia saya sehari-hari, dikembalikan lagi ke pangkuan Kemendikbud. Maka, bos GoJek itu akan menjadi bos saya juga. Baik sebagai pengajar perguruan tinggi maupun rektor kampus “merah-putih” Banyuwangi.

Sesaat Nadiem disebut presiden, komentar nyinyir bertebaran di medsos. Meski banyak pula yang optimis. Saya termasuk yang semula galau. Tapi, Pak Tua menyingkirkannya. “Nadiem itu usianya kan sudah 35 tahun. Sudah cukup siap untuk mengurus

pendidikan,” kata Pak Tua, membuat saya mengerutkan dahi. Padahal menteri lain usianya rata-rata 50 tahun ke atas. Apalagi Nadiem akan mengurus soal pendidikan. Yang bukan hanya mencetak orang pintar dan trampil. Tapi, juga berkarakter.

“Bayangkan, Mas,” lanjut Pak Tua, seperti membaca kegalauan saya. “Dibanding anak-anak muda yang merumuskan Sumpah Pemuda, yang amat sangat hebat itu, mereka rata-rata baru belasan dan dua puluhan tahun,” tegasnya dengan raut muka meyakinkan.

Agak aneh komparasi Pak Tua. Tapi, menarik. Dan, benar. Sumpah Pemuda adalah imajinasi masa depan nan hebat. Gagasan super visioner. Bukan pikiran *ngawur*. Kaya perpektif. Penuh ketajaman analisis terhadap dinamika masyarakat. Bukan hanya lokal. Tapi, global. Berisi kekuatan prediksi masa depan. Sekaligus peneguhan tekad dan jatidiri. Bagi rakyat jajahan yang lokal, kedaerahan dan terpecah-pecah. Untuk menjadi satu “bangsa”. Yang merdeka.

Sumpah Pemuda adalah ide, jiwa, tekad, dan tindakan untuk masa depan. Karya anak-anak muda. Maka, anak-anak muda lah yang paling punya hak bicara. Mereka lah pemilik masa depan.

Maka, apa hak saya meragukan Nadiem? Karena usia? Karena Nadiem bukan guru, dosen, atau orang yang sehari-hari menggeluti pendidikan? Bukankah kemendikbud selama ini dinahkodai orang-orang yang (dari segi usia) boleh dibilang tua? Bukankah bos kemendikbud selama ini selalu orang-orang perguruan tinggi?

Salahkah bila presiden menginginkan krida lain? Misal, agarantisipasi dunia pendidikan lebih cepat lagi terhadap dunia baru. Yang konon penuh disrupsi. Yang, sejauh saya ikuti, juga mulai jadi topik diskusi, ceramah, seminar, di kampus-kampus. Kata

“Revolusi Industri 4.0” menghiasi acara di kampus-kampus Indonesia akhir-akhir ini.

Tapi, orang-orang pendidikan, termasuk saya, baru tahap bingung. Baru belajar mengenali dunia yang konon penuh disrupsi. Baru ber-*gesah*. Itu pun baru sebagian kecil. Selebihnya tenang-tenang saja. Belum menyadarinya. Meski sehari-hari ke kampus naik GoJek. Meski suka belanja di Tokopedia. Meski putra-putrinya pelanggan Ruangguru. Dan, percepatan antisipasi itu pada tataran aksi ada pada Nadiem. Sang eksekutor muda, terpelajar, brilian, kaya. Lihai menerawang masa depan.

Saya kira, presiden sedang bertaruh. Tapi, bukankah sejarah politik pada hakekatnya berisi sejarah pertarungan? Besar ataupun kecil. Dan, Nadiem dipertaruhkan. Kemampuan penerawangannya diuji. Kecepatan dan keberanian eksekusinya ditantang. Seperti halnya Soenario, J. Leimena, Soegondo Djojopoespito, M. Yamin, Amir Syarifuddin, W.R. Soepratman, dan tokoh lain. Saat berteriak “**satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia**”. Indonesia saat itu baru mimpi masa depan. Baru pernyataan. Belum kenyataan.

Nadiem sedang melangkah. Saya tak meragukannya. Melalui GoJek, Nadiem berhasil menyulap sumber daya pasif menjadi sumber daya aktif. Nadiem mempertontonkan kedahsyatan kata “kolaborasi” berbasis teknologi digital. Dan, hasilnya spektakuler. Pak Presiden pun terkesima.

Nadiem tahu hati dan pikiran generasi yang kini ada di bangku sekolah/kampus. Generasi ber-DNA digital. Yang denyut nadinya menyatu dengan gawai. Yang mulai meninggalkan tradisi keberaksaraan produk mesin cetak. Yang telah memindahkan sebagian memorinya dari otak ke *chip*. Tentu dengan segenap karakter dan gaya hidup bentukannya.

Saya yakin Nadiem punya cara menggerakkan sumber daya. Terutama mengaktifkan sumber daya pasif di kemdikbud. Sebuah

cara dengan kata kunci “kolaborasi”. Berbasis teknologi digital. Berkaca dari GoJek, saya tak meragukan. Kecepatan, kemampuan, dan keberanian eksekusi Nadiem pastilah top.

Tapi, saya juga membaca sisi lain. Yang tak mudah buat Nadiem. Yakni, menaklukkan “sosok” lembaga pendidikan kita. Sosok itu, di mata saya, sudah bagaikan zombie. Serba menakutkan. Bukan menumbuhkan kreasi, tapi mematikan. Sosok itu terbentuk melalui proses panjang pascakolonial. Saling bercumbu antara politik birokrasi, pasar, dan feodalisme.

Simaklah anak-anak kita. Dari pagi hingga sore belajar di sekolah. Pulang sekolah harus les pelajaran ini-itu. Malam hari mengerjakan PR sekolah. Ketiduran, karena kelelahan. Lalu, tak jarang orang tua yang merampungkan. Agar sang anak tak kena hukuman.

Berangkat sekolah sering murung. Di sekolah pun kerap murung. Pulang sekolah masih murung. Banyak hal menakutkan. Materi ajar dan bebannya. Orang-orang dengan jiwa feodalnya. Sikap dan cara melayani anak. Bahkan sekolah/kampus belum juga bebas dari “ketakutan intelektual” warisan Orde Baru. Yakni, larangan bacaan berbau “kiri”. Akibatnya sekolah/kampus juga menyingkirkan karya-karya para pendiri bangsa. Maka, sekolah/kampus belum menjadi ruang kreatif. Buat melahirkan sintesis-sintesis. Sekolah/kampus baru menjalankan ritus-ritus akademik.

Di rumah pun ketakutan. Orang tua ikut-ikutan menjadi zombie. Anak dipaksa belajar mengikuti kehendak orang tua. Dipaksa ikut bimbel. Agar angka rapornya tinggi.

Saya berharap Pak Menteri Nadiem tak menjadi korban zombie. Sebaliknya kridanya bisa menghancurkan sosok zombie itu. Paling tidak meretakkan kepalanya. Gagasan dan daya eksekutor Pak Menteri tak akan mengubah apa-apa bila sosok zombie itu masih perkasa.



Saya catat petuah Pak Tua. Menjelang Probowangi berhenti di Stasiun Jember. “Melangkah lah anak muda dengan kedirianmu. Sabarlah... Sumpah Pemuda berujung kemerdekaan, karena kesabaran tokoh-tokohnya,” demikian Pak Tua. Saya pun mengamininya.

*28 Oktober 2019*



# Merdeka Belajar

Jumat sore lalu, 31 Januari 2020, saya menemani Iwan Taruna. Kawan saya itu dilantik menjadi Rektor Universitas Jember periode 2020 – 2024. Di Jakarta oleh sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama menteri.

Saya agak kecewa. Sebenarnya berharap Mas Menteri sendiri yang melantik. Mengapa? Ingin mendengar langsung arahan tentang “merdeka belajar” yang digagasnya. Tapi, ya sudah. Saya harus puas dengan sambutan Pak Ainun Naim. Yang tidak secara khusus menyampaikan gagasan Mas Menteri, yang hangat dibicarakan kalangan pendidik.

Di catatan berjudul “Nadiem, Sabarlah” (*Radar Banyuwangi*, 28 Oktober 2019), saya mengapresiasi keberanian presiden mengamanahi Nadiem Makarim, yang umurnya baru 35 tahun, sebagai mendikbud. Tapi, saya juga melihat tantangan besar yang tak mudah

buat bos GoJek itu. Yakni, menaklukkan “sosok” lembaga pendidikan di negeri ini, yang buat saya, sudah bagaikan “zombie”. Serba menakutkan. Bukan hanya anak didik, tapi juga orang tua. Alih-alih menumbuhkan kreasi, malah mematikan. Sosok zombie itu terbentuk melalui proses panjang pascakolonial. Saling bercumbu antara kepentingan politik birokrasi, pasar, dan feodalisme.

Ternyata mantan bos GoJek itu brilian dan berani. Dia siapkan senjata pembunuh zombie pelan-pelan. Mas Menteri menyebutnya “merdeka belajar”. Saya pun terkesima. Angkat topi. Meski belum tahu persis apa dan bagaimana gagasan itu di lapangan.

Kata “merdeka belajar” sungguh *out of the box*. Mencengangkan, sekaligus membuka harapan. Bak Ratu Adil bersenjata trisula bagi rakyat jajahan dulu. Yang oleh Soekarno dibaca secara semiotik di naskah pembelaannya yang berjudul *Indonesia Menggugat* (1930). Lalu, ditegaskan lagi pada pidato bersejarah 1 Juni 1945 di sidang BPUPK sebagai konsep dasar ketatanegaraan (*weltanschauung*). Disebutnya Trisila (Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan). Yang dijabarkan lebih lanjut menjadi Pancasila.

Memang tak mudah. Puluhan tahun zombie itu menakut-nakuti anak-anak negeri ini untuk tumbuh sebagai generasi hebat. Generasi yang mewarisi kehebatan pendahulunya. Yang mampu membangun Candi Borobudur yang super megah. Yang mampu mengalih-ubah teks Ramayana/Mahabharata menjadi seni pertunjukan wayang (tontonan sekaligus tuntunan) dengan segenap pernik-perniknya. Yang mampu melahirkan Sumpah Pemuda, Proklamasi, dan Pancasila. Zombie itu telah memotong DNA generasi hebat kita.

Tapi, saya yakin. Zombie itu akan terbunuh. Meski pelan-pelan. Anak-anak yang kini di bangku sekolah adalah anak-anak digital. Hidup dalam ekosistem digital. Produk teknologi digital. Sangat berbeda dengan generasi saya dan sebelumnya. Produk teknologi mesin cetak.

Saya tumbuh dalam tradisi “keberaksaraan (*literacy*) pertama” produk mesin cetak. Anak-anak kini tumbuh dalam tradisi, menurut saya, “keberaksaraan kedua” produk teknologi digital. Model literasi mereka sangat berbeda. Literasi mereka memadukan antara aksara, suara, dan gambar hidup (*video*).

Teknologi menghasilkan anak-anak zaman. Sejarah kebudayaan mencatatnya. Teknologi mesin cetak masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-19 bersama kolonialisme. Teknologi pencetak tulisan dan gambar secara massal itu lalu menjadi basis model pendidikan (belajar) sejak itu. Lahirlah generasi kutu buku. Lahir pula nasionalisme.

Kini teknologi mesin cetak yang turut membidani bangsa Indonesia itu sudah senja. Perannya mulai digeser oleh teknologi digital. Yang juga melahirkan anak-anak ber-DNA digital. Anak-anak *multitasking*. Maka, cepat atau lambat model pendidikan (belajar) pun akan berubah. Teknologi digital akan memaksa kita untuk menerima cara belajar yang merdeka. Cara belajar *multitasking*.

Maka, pelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk program studi dengan segenap kurikulumnya dewasa ini juga akan berubah. Cepat atau lambat. Juga tata kelolanya. Juga sarana prasarananya. Bahkan ruang dan waktu belajar.

Gagasan “merdeka belajar” mestinya akan melahirkan gerakan “ayo belajar”. Bukan “ayo sekolah”. Mas Menteri harus mengubah slogan “Ayo Sekolah” menjadi “Ayo Belajar”. Paradigmanya berbeda. Ayo sekolah berbasis pada formalitas. Berorientasi pada penanda formal (ijazah, nilai). Ayo belajar berbasis pada kebutuhan. Berorientasi pada kompetensi.

Saya lalu teringat Kang Gun, tokoh Sedulur Sikep di Sukolilo, Pati. Kawan saya itu menasehati dengan pernyataannya yang kritis dan tajam. “*Yen sing kok maksud sekolah kuwi koyo sing*

*kok lakoni, dulur-dulur sikep kene yo ora sekolah. Ning yen sing kok maksud sekolah kuwi sejatine sinau, dulur-dulur yo sekolah,”* kata Kang Gun. Sedulur Sikep (sering disebut *wong Samin*) memang tidak sekolah. Tapi, mereka belajar. Belajar apa? Kang Gun menjawab singkat tapi mendalam sekali, “*Sinau bab urip, kangge urip.*”

Bagi Sedulur Sikep, hidup adalah bertani. Bukan yang lain-lain. Maka, mereka belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial budaya, dan nilai-nilai yang mendukung kebutuhan bertani secara berkelanjutan. Demi kesejahteraan bersama. Secara turun-temurun.

Maka, mereka belajar ilmu bertani berkelanjutan. Bukan bertani ala kapitalisme. Dan, belajar tersebut bukan melalui sistem sekolah formal, melainkan komunitas langsung di sawah. Bertani berkelanjutan tidak butuh ijazah. Yang dibutuhkan adalah ilmu bertani berkelanjutan. Dan, Sedulur Sikep kukuh hingga kini. Meski pada zaman Orde Baru harus hidup tertekan. Karena melawan kebijakan Revolusi Hijau. Kang Gun dan komunitasnya ternyata telah menjalani “merdeka belajar”. Sejak dulu.

Saya membayangkan gagasan “merdeka belajar” dalam jangka panjang juga akan meruntuhkan dominasi informasi oleh pusat/ lembaga/kalangan tertentu. Teknologi digital dengan azas “merdeka belajar” akan menyediakan lanskap baru yang memungkinkan tumbuh banyak pusat/subjek. Hubungan antarpusat/subjek bukan berpola hirarkis, tapi kolaboratif.

Dengan “merdeka belajar” siapapun berpeluang tumbuh sebagai *trendsetter*. Bukan sekadar *followers*. Tantangan saya. Juga kawan saya, Iwan Taruna.

8 Februari 2020

# Berenanglah Di Lautan

**M**andiri Assembly Hall di Jalan Sudirman, Jakarta, penuh. Rabu kemarin, 12 Februari 2020. Ada 300 rektor/direktur perguruan tinggi negeri/swasta, 143 pejabat BUMN, dan ratusan mahasiswa peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB). Di Mandiri Assembly Hall itu diluncurkan PMMB 2020.

Saya senang berada di sana. Diundang oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Semacam konsorsium BUMN untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia. PMMB adalah salah satu program FHCI. Saya diundang, karena keikutsertaan Untag Banyuwangi dalam PMMB.

Lebih senang lagi, di forum itu saya bisa mendengar langsung pidato Mendikbud Nadiem Makarim. Meski hanya 20 menit. Cukup untuk mengobati kekecewaan saya saat pelantikan kawan saya, Iwan Taruna, sebagai Rektor Universitas Jember periode

2020 – 2024. Karena tak mendengar suara Mas Menteri di pelantikan itu (*Radar Banyuwangi*, 8 Februari 2020).

Mantan bos GoJek itu memang memukau. Gemuruh tepuk tangan audien mengantarkan Mas Menteri menuju podium. Tak basa-basi. Meski tetap menyapa para pihak yang hadir. “Bro Erick Thohir...,” sapa Mas Menteri kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Sapaan khas sesama anak muda kini.

Nadiem menjelaskan kebijakan “kampus merdeka”. Tak lebih 20 menit. Saya menyimakinya. Sesungguhnya tak berbeda dengan yang sudah beredar di masyarakat. Baik melalui media massa maupun media sosial.

Ada empat kebijakan pokok. Pertama, pembukaan program studi. Kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum. Keempat, hak belajar tiga semester di luar program studi. Tapi, hanya penjelasan kebijakan keempat yang memakan waktu panjang. Mungkin karena paling menyentuh arti merdeka buat mahasiswa.

Hak belajar tiga semester di luar program studi itu bersifat sukarela. Mahasiswa dapat mengambil atau tidak. Satu semester dapat diambil di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Setara dengan 20 SKS (satuan kredit semester). Lalu, mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi dua semester. Setara dengan 40 SKS. Maka, beban wajib di program studi asal tinggal lima semester.

Mas Menteri juga mengubah definisi SKS. Bukan lagi “jam belajar”, melainkan “jam kegiatan”. Kegiatan itu bisa belajar di kelas, magang di dunia kerja, mengerjakan proyek di desa, mengajar di sekolah, studi independen, mengembangkan kegiatan kewirausahaan, mengerjakan proyek kemanusiaan.

Luar biasa inovatif. Juga sangat berani. Meski secara teknis tidak sederhana. Membutuhkan sinergi yang baik antarinstansi.



Perguruan tinggi juga harus merancang ulang kurikulum. Juga pelayanan yang lain. Menetapkan mata kuliah yang benar-benar wajib bagi program studi. Sebanyak lima semester. Atau, setara dengan 100 SKS. Selebihnya mahasiswa dapat mengambil hak belajar di luar program studi. Bahkan di luar perguruan tinggi.

Selama ini mahasiswa memang terkungkung di tembok tebal program studi. Sangat jarang bergaul dengan mahasiswa di luar program studi. Sementara itu tidak semua apa yang disajikan program studi cocok dengan kebutuhan/keinginan/talenta mahasiswa. Banyak yang terpaksa. Di kelas jurnalistik yang saya bimbing, misalnya, sebagian besar peserta ternyata terpaksa mengambil. Bukan karena ingin belajar jurnalistik. Tapi, sekadar menggugurkan kewajiban. Padahal di antara mereka mungkin ada yang tertarik kelas ilmu politik di program studi lain.

Tiga tahun lalu, di Untag Banyuwangi, saya sudah mewacanakan belajar di luar perguruan tinggi. Awal saya menata Untag Banyuwangi. Tapi, konsep yang saya tawarkan masih belajar di dalam kelas. Misal, mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Untag Banyuwangi diizinkan mengikuti beberapa mata kuliah di FH Universitas Jember. Hasil belajarnya dievaluasi oleh dosen FH Universitas Jember. Nilainya langsung masuk kartu hasil studi di Untag Banyuwangi. Saya pun sudah melakukan pendekatan dengan pihak Universitas Jember. Dan, diizinkan. Tapi, untuk dilaksanakan masih terkendala secara teknis.

Menurut saya, bila gagasan tersebut bisa dilaksanakan akan sangat bermakna bagi mahasiswa. Yang saya lihat bukan substansi kuliahnya. Tapi, nilai tambah yang akan diperoleh mahasiswa. Dari lingkungan yang berbeda. Seorang mahasiswa Untag Banyuwangi yang ikut kelas di Universitas Jember akan memasuki lingkungan yang berbeda. Tantangannya berbeda. Dan, saya yakin efeknya sangat bermakna. Di bidang *softskill*, pendidikan karakter.

Teks boleh sama. Tapi, konteks yang berbeda bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Di Untag Banyuwangi teks itu hanya dibaca oleh orang-orang lokal. Orang Genteng, Srono, Rogojampi, Purwoharjo, dan sekitarnya. Di Universitas Jember teks itu akan dibaca oleh orang-orang yang lebih luas dan beragam. Latar belakang sosial, budaya, maupun pengalamannya. Apalagi dibaca di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Di sana dibaca orang-orang dari berbagai bangsa di dunia. Efek kognitifnya berbeda. Juga efek kejiwaannya. Saya yakin semakin luas dan beragam subjek di lingkungan tersebut akan semakin membentuk ketangguhan dan keunggulan subjek. Maka, meminjam Mas Menteri, “Berenanglah di lautan. Jangan di kolam renang.”

Saya acungi jempol inovasi dan keberanian Mendikbud Nadiem Makarim. Tiga semester mahasiswa diberi hak berenang di lautan. Mereka akan bertemu hiu, ubur-ubur, gelombang besar. Bahkan badai. Banyak dan besar pula tantangannya. Yang tak pernah ditemukan di kolam renang. Tapi, perguruan tinggi harus memastikan keselamatannya.

Saya semakin paham letak pendidikan karakter dari kebijakan “Kampus Merdeka”. Berenanglah di lautan. Saya lalu teringat petuah Bung Karno. “Barang siapa ingin mutiara, haruslah berani terjun di lautan dalam,” kata sang proklamator. Semoga kebijakan “kampus merdeka” mampu mengantarkan anak-anak Indonesia untuk mendapatkan mutiara itu.

*16 Februari 2020*

# Membalik Arus Balik

Catatan ini terinspirasi karya Pramoedya Ananta Toer. Judulnya *Arus Balik*. Saya tertarik. Buat membaca sisi lain gagasan “merdeka belajar” Mas Menteri Nadiem. Melengkapi tiga catatan sebelumnya.

Di *Arus Balik*, maestro sastra Indonesia itu bertutur tentang kebesaran Nusantara. Di masa kejayaan Majapahit. Nusantara merupakan kesatuan maritim. Kerajaan laut terbesar di bumi. Terbesar pula kapal-kapalnya. Juga bandar-bandarnya. Tak tertandingi.

Maka, arus bergerak dari bumi selatan ke utara. Kapal-kapalnya, manusianya, adab perbuatannya. Juga cita-citanya. Semua bergerak dari Nusantara. Di bagian selatan ke “atas angin” di bagian utara.

Tapi, arus berbalik. Utara menyerbu selatan. Dengan kapal-kapalnya yang lebih besar. Terus-menerus. Utara lalu menguasai jalur rempah. Menguasai urat nadi kehidupan Nusantara.

Nusantara terdesak. Terseok-seok. Terpecah-pecah. Bandar-bandarnya sepi. Kekalahan demi kekalahan menjadi dongeng baru. “Kapal kita makin lama makin kecil. Seperti kerajaannya. Kapal besar hanya bisa dibuat oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara...,” seru Wiranggaleng, tokoh di *Arus Balik*.

Maka, Indonesia Raya adalah mimpi para cucu-cicit Wiranggaleng. Tentu dengan cara pandang modern. Dengan instrumen modern. Di Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 Soekarno menyeru, “Saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka..., tidak lain dan tidak bukan ialah satu **jembatan!**” Di seberang jembatan itulah bangunan Indonesia Raya. Kata sang pencipta lagu *Indonesia Raya*, W.R. Soepratman, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.”

Jelas sekali tujuan dan strateginya. Bangun jiwanya dulu. Lalu, bangun badannya. Di dalam jiwa terdapat spirit, karakter, bahkan mimpi-mimpi. Di dalam jiwa itu pula para cucu-cicit Wiranggaleng belajar merasakan dan mengerti hidup berkebangsaan Indonesia. Di Jiwa lah ditumbuhkan kesadaran dan kecerdasan kolektif terhadap masa lalu demi masa depan. Di jiwa itu kita mendefinisikan diri, memproyeksikan diri.

Eropa menyerbu Nusantara setelah menemukan ”jiwa” Pencerahan (*aufklärung*). Utara lalu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kapalnya besar dan tangguh. Sanggup mengarungi samodra luas. Menjelajahi Nusantara. Lalu, menguasai jalur rempah dan hasil buminya. Eropa makmur. Nusantara hancur. Pun jiwanya.

Maka, Indonesia Raya jelas gerakan membalik arus balik. Tapi, sayang, sejak konsolidasi kekuasaan Orde Baru (1965) makna dan spiritnya melemah. Sejak itu terjadi pelemahan secara sistemik. Rupanya tidak semua orang suka, bila makna dan spirit Indonesia Raya menguat di jiwa para cucu-cicit Wirang-galeng.

Diberanguslah kemerdekaan belajar (berpikir). Ruang belajar disterilkan. Dari pikiran lain yang kritis. Sejumlah media massa dibredel. Karena memberi tempat pikiran lain. Buku dilarang, meski akademik. Karena berisi pikiran lain yang kritis. Seingat saya, buku *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* karya Yoshihara Kunio (LP3ES, 1990) termasuk yang pernah ditarik dari peredaran. Padahal buku itu sangat akademis. Penting pula bagi perguruan tinggi, khususnya ilmu-ilmu sosial.

Masih segar dalam ingatan saya. Saat menghabiskan novel *Bumi Manusia* karya Pram pada 1984. Saya menyelesaikan dengan berdebar-debar. Maklum, buku itu dilarang. Karena dinilai menyiratkan ajaran Marxisme-Leninisme. Bahkan, Max Lane, pegawai Kedubes Australia di Jakarta dipulangkan ke negaranya (1981). Karena menerjemahkan *Bumi Manusia* ke bahasa Inggris.

Franz Magnis-Suseno, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, pun menunda menerbitkan pengantar ringkas ajaran Karl Marx. Karena larangan yang sama. Setelah Orde Baru runtuh, buku *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (1999) karya Franz Magnis-Suseno bertebaran di toko buku.

Orde Baru secara politik sudah tumbang. Dua puluh satu tahun lalu. Tapi, dampaknya bagi kreativitas kebudayaan, bagi kemerdekaan belajar, masih sangat terasa. Mari kita renungkan! Mengapa sebagian besar mahasiswa kini tidak tahu pemikiran

tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka? Sebagian besar mereka juga asing dengan karya-karya Pram. Karya dan pemikiran hebat tokoh bangsa tak berjejak di memori kolektif bangsanya.

Padahal era reformasi sudah dua puluh satu tahun. Kini pemikiran mereka juga gampang ditemukan di toko buku. Cetakannya pun bagus. Juga tidak perlu takut ditangkap aparat. Karena membawa *Bumi Manusia*, atau *Madilog*-nya Tan Malaka.

Terbukti, sistem makna tinggalan Orde Baru masih menguasai ruang belajar hingga kini. Sistem makna itu dengan sendirinya “menyeleksi” pilihan-pilihan kita. Termasuk pilihan “melupakan” bahwa kita punya pemikir kenegaraan dan sastrawan hebat.

Maka, tepat sekali gagasan “merdeka belajar”. Gagasan itu seharusnya juga membebaskan ruang belajar, pusat kreativitas kebudayaan. Dari cengkeraman sistem makna tinggalan Orde Baru. Kreativitas kebudayaan mensyaratkan adanya refleksi dari hubungan antarteks. Kreativitas tidak akan tumbuh dari teks tunggal yang monolitik. Maka, ruang belajar harus berisi persilangan antarteks. Bukan teks monolitik. Agar muncul refleksi-refleksi, sintesis-sintesis, imajinasi-imajinasi. Demi menghasilkan inovasi.

Saya lalu bermimpi. Suatu hari kelak Tetralogi Buru (*Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca*) dilalap habis siswa-siswa tingkat SMA. Berkat arahan kurikulum. Bukan kesadaran personal guru. Tetralogi Buru adalah karya sastra bagus untuk memahami Indonesia Raya. Sangat pas diapresiasi di kelas bahasa/sastra.

Masuk perguruan tinggi mereka lalu mendalami pemikiran para tokoh pendiri bangsa tentang Indonesia. Konteksnya pendidikan karakter. Mereka mendiskusikan di kelas Pancasila. Membuat komparasi-komparasi, lalu merefleksikan.

Niscaya mereka akan mudah membayangkan Indonesia Raya. Sebuah negara kesatuan maritim besar. Yang berdasarkan Pancasila. Bukan berdasarkan agama, bukan pula komunisme, kapitalisme. Apalagi ideologi transnasional mutakhir.

Wiranggaleng pun tersenyum lega. Menyaksikan *instastory* cicitnya, Bupati Tuban 2045. Dia lalu berbisik kepada Idayu, istrinya, “Cicit-cicit kita top. Sukses membalik arus balik.”

4 Maret 2020





# Antropologi Covid-19

**D**alang wayang kulit selalu mewacanakan. Setiap kali memainkan lakon. Bab *pageblug*. Keadaan dunia yang gawat sekali. Wabah penyakit berujung kematian. Pagi seseorang sakit, sore mati. Sore seseorang sakit, pagi mati.

Pak dalang tak menjelaskan penyebabnya. Yang jelas narasi *pageblug* selalu menyertai episode *gara-gara*. Di episode inilah muncul ksatria. Yang baru saja menuntaskan pertapaannya. Menjauh dari keramaian dunia. Menyendiri di tempat sunyi. Biasanya di tengah hutan belantara di lereng gunung. Sang ksatria muncul disambut para pengawal. Yang disebut *punakawan*: Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar lalu menyarankan ksatria untuk menyelamatkan keadaan dunia.

Tradisi tutur itu linier dengan Teori Ratu Adil. Terutama di zaman penjajahan. Zaman *gara-gara*. Suatu zaman tatkala sering

terjadi *pageblug*. Karya klasik Prof. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, melukiskan Teori Ratu Adil itu.

Tapi, Soekarno pada tahun 1930 sudah menangkapnya. Soekarno bukan menolak Teori Ratu Adil. Tapi, mencernanya secara semiotik. Ratu Adil dipahami sebagai sistem kehidupan. Bukan sosok manusia. Maka, Trisula (tombak bermata tiga), senjata Ratu Adil, diterjemahkan menjadi konsep Trisila (Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, Ketuhanan). Bila diperas lagi menjadi Gotong Royong. Bila diperinci lagi menjadi Pancasila.

Kini, awal 2020, muncul *gara-gara* baru. *Pageblug* milenial. Disebabkan virus baru. Namanya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), varian virus korona. Karakteristiknya pun khas. Menyebar dari manusia ke manusia secara berantai. Secara tempel-menempel, sentuh-menyentuh antarmanusia. Atau manusia dengan benda. Covid-19 dapat hidup di udara dalam waktu tertentu. Dapat pula hidup dengan menempel di benda-benda dalam waktu tertentu pula. Bergantung jenis bendanya.

Dunia heboh. Dilanda ketakutan, kecemasan. Covid-19 telah menginfeksi dan merenggut ribuan nyawa manusia. Bukan cuma di negara berkembang, tapi juga negara maju. Bukan hanya rakyat biasa, tapi juga pejabat. Kaya maupun miskin. Tua maupun muda. Laki-laki maupun perempuan. *Pageblug* kali ini anti-suku/agama/ras/sosial. Anti-geografi, bahkan anti-ideologi.

Berawal dari Wuhan (Tiongkok) akhir 2019, menyebar ke negeri tetangganya. Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Filipina. Lalu, Eropa, Amerika, Australia. Menyebar pula ke Timur Tengah. Tak luput pula Indonesia. Karena mobilitas manusia yang tinggi dewasa ini, Covid-19 dengan cepat menjadi pandemi global.

Maka, jaga jarak (*social distancing*) adalah kata kunci pencegahan. Orang harus berjarak dengan orang lain. Konon,

sekurang-kurangnya 1 meter. Saya yakin tidak sulit dilakukan untuk kegiatan tertentu. Tapi, jelas tidak mudah untuk aktivitas yang mengundang banyak orang. Tidak mudah pula untuk tak menyentuh benda-benda yang bersifat publik. Atau, tak mengunjungi tempat-tempat publik.

Maka, mobilitas manusia dikurangi. Pergi-pergi dibatasi, ditunda. Bila perlu dibatalkan. Kegiatan yang melibatkan banyak orang ditunda. Kantor, sekolah, dan pelayanan publik menutup modus tatap muka. Menggantikannya dengan modus daring dan modus lain.

Bahkan, beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown*. Mengunci akses masuk maupun keluar dari dan ke daerah/wilayah/negara. Hingga 22 Maret, konon, sudah 15 negara *me-lockdown*. Beberapa di antaranya Tiongkok, Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, El-Savador, Argentina, Yordania, Libanon. Pun tetangga kita, Malaysia dan Filipina. Orang dikurung di kediamannya. Yang terpapar Covid-19 diisolasi di rumah sakit. Yang sehat pun diisolasi di kediamannya. Entah berapa lama.

Dampaknya pun hebat. Terutama di bidang ekonomi. Haji dan umroh misalnya. Bila dibatalkan sepanjang tahun ini, akibatnya sangat besar. Bukan hanya bagi Arab Saudi, tapi juga negara lain. Karena mobilitas manusia dibatasi, industri wisata pasti rugi besar.

Akibat Covid-19 kita melihat dunia tak lagi ingar-bingar. Gemuruh eksploitasi bumi dan seisinya tiba-tiba melemah. Sebagian berhenti. Kantor-kantor sepi. Sekolah-sekolah sepi. Pusat perbelanjaan sepi. Masjid, gereja, dan tempat ibadah lain pun makin sepi. Kita sedang memasuki ruang lain.

Saya lalu teringat teori liminalitas van Gennep. Antropolog berdarah Belanda itu memperkenalkan ruang liminal. Ruang “antara” sebagai transisi. Dari “sini” ke “sana”. Di ruang liminal

manusia mengambil jarak. Dari “yang sudah” untuk memasuki “yang akan”. Manusia disucikan di ruang liminal. Kata van Gennep, ritus-ritus peralihan memaksa manusia memasuki ruang liminal.

Kini kita dipaksa oleh Covid-19. Digiring memasuki ruang sepi yang menjemukan. Dipaksa berjarak dengan kehidupan sehari-hari. Yang ingar-bingar penuh kompetisi saling mengalahkan. Yang tak jarang dilakukan secara tidak adil, diskriminatif, kekerasan.

Di ruang liminal itu Covid-19 memaksa kita mengerti arti seseorang bagi orang lain, dan orang lain bagi seseorang. Demi hari esok yang lebih baik. Bagaikan ksatria Ratu Adil. Keluar dari pertapaannya dengan membawa senjata trisula. Untuk membunuh keangkuhannya. Demi dunia yang *tata tentrem*.

*The Lockdown: One Month in Wuhan* (2020) memberikan referensi bagus. Film dokumenter berdurasi 33 menit 14 detik yang bisa dinikmati lewat *YouTube* itu menggambarkan betapa semangat, etos kerja, dan kemauan kerjasama, sangat penting. Melawan Covid-19 butuh kebersamaan. Butuh gotong royong. Tidak cukup dengan sarana kesehatan canggih dan tenaga medis handal.

Melalui cara yang berbeda-beda, agama mengajarkan liminalitas. Yang muslim, misalnya, di bulan Ramadan diwajibkan puasa selama satu bulan penuh. Umat Hindu di Pulau Dewata melakoni Nyepi setiap tahun sekali. Kini Covid-19 mengajarkan liminalitas dengan cara yang sama. Kepada umat manusia yang berbeda-beda agama, ras, suku, sosial, kebangsaan.

Saya berharap akan muncul aksi baru. Dari kesadaran baru. Untuk dunia baru.

## Setiap Angka adalah Wajah

**A**ngka kematian terus membubung. Justru yang lebih parah di negara-negara maju dan kaya. Dunia benar-benar *dikerjain* makhluk super kecil, Covid-19. Lihatlah! Negara-negara di Eropa kelabakan. Amerika Serikat (AS) yang adidaya pun kalang kabut. Gubernur New York bahkan memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang. Covid-19 telah merenggut ribuan nyawa manusia. Dari sudut jumlah orang terpapar dan kematian, Eropa dan AS melampaui negara-negara lain. Bahkan, melampaui Tiongkok, negeri pandemi pertama.

Tak ada desingan peluru. Tak ada bom meledak. Tapi, kematian susul-menyusul. Kematian masal menyergap dunia tanpa bersuara. Dalam tempo cepat. Per 13 April, AS kehilangan 22.115 warganya. Italia telah mengubur 19.899 orang. Di Spanyol Covid-19

membunuh sebanyak 17.209 jiwa. Disusul Prancis sebesar 14.393. Inggris 10.612 jiwa. Belum negara-negara Eropa lain.

Eropa adalah negeri yang dikagumi Minke di *Bumi Manusia*-nya Pramoedya Ananta Toer. Pusat ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kiblat kebudayaan modern. Rujukan kemajuan bagi bangsa-bangsa lain.

Tapi, sejarah juga mencatat sisi bopeng di balik kemajuan itu. Sejarah dunia hampir identik dengan sejarah penaklukan, sejarah perang. Sejarah bunuh-membunuh. Baik skala besar maupun kecil. Dan, Eropa, juga AS, adalah pemeran utama.

Eropa dan AS adalah “saudara kembar” yang berkontribusi besar dalam konstruksi dunia. Jejaknya sangat kuat. Terhadap kolonialisme/imperialisme bangsa-bangsa Asia-Afrika. Terhadap Perang Dunia II, yang konon menelan korban 60 juta lebih jiwa. Juga terhadap tata dunia (pasca-perang) yang etnosentris dan diskriminatif.

Kini, melalui Covid-19 kita menyaksikan gelagat dekonstruksi. Yang digerakkan oleh kepentingan saling melindungi, saling mengamankan antarbangsa, antarmanusia. Dari pembunuh masal nirsuara, Covid-19.

Melawan Covid-19 tidaklah mudah. Meski dia akan mati sendiri. Karena tak lagi menemukan inang. Maka, dunia serentak membatasi kontak fisik antarmanusia. Semua negara memerintahkan rakyatnya mengurung diri. Mengurangi mobilitas. Menutup akses keluar/masuk. Meski dampaknya sangat besar di banyak bidang kehidupan. Agar rantai penyebaran Covid-19 terputus. Tak ada lagi manusia sebagai inang.

Jumlah kematian korban Covid-19 memang masih jauh di bawah Perang Dunia II. Yang konon menelan 60 juta lebih nyawa manusia. Kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia baru melampaui angka 100.000 per 13 April.

Tapi, kematian susul-menyusul, masal, dan dalam jangka waktu cepat jelas bukan kematian wajar. Pasti kematian karena bencana. Kematian yang bisa dicegah. Bukankah tugas negara modern di antaranya adalah melindungi rakyat dari bencana dan kematian tak wajar lain? Bahkan, negara wajib mengusut kematian warganya yang ditengarai tak wajar. Wajib pula menghukum pelakunya.

Maka, setiap angka kematian akibat Covid-19 adalah wajah. Ya, wajah seorang warga negara. Yang sarat pesan, sekaligus mengingatkan. Wajah-wajah itu mengingatkan dunia bahwa negara wajib melindungi warganya. Negara wajib menjauhkan warganya dari bencana apapun dan kematian tak wajar lain. Meski ongkosnya tak murah.

Saya termenung. Benarkah Covid-19 membawa angin dekonstruksi? Terhadap tata dunia produk perang? Dengan cara saling melindungi, saling mengamankan antarbangsa, antarmanusia? Sebuah makna baru, antitesis perang. Mungkinkah krida saling melindungi, saling mengamankan antarbangsa, antarmanusia, dari kesengsaraan dan bencana/kematian tak wajar, akan menjadi nilai utama dunia? Ideologi baru dunia pasca-Covid-19?

Tiba-tiba saya teringat Bimbo. Saat melantunkan *Surat Buat Tuan Reagan dan Tuan Andropov*. “Yang Mulia, Tuan Reagan dan Tuan Andropov. Mata anda berdua menembus seluruh dunia. Dan bahkan keluar angkasa raya. Anda berdua damai, seluruh dunia ikut gembira. Pabila anda berdua marah, sungguh kami tak suka...,” tutur Bimbo dengan vokal yang sangat merdu-berwibawa.

Lagu itu dirilis pada 1984. Saat dunia dicekam Perang Dingin. Antara Blok Barat yang dipimpin AS dan Blok Timur yang dikomandani Uni Soviet (US). AS yang kapitalis dipimpin Ronald

Reagan. US yang komunis dikomando Yuri Andropov. Kedua negara dijuluki “*super power*”, adidaya.

Disebut Perang Dingin, karena kedua negara berebut pengaruh dunia pasca-Perang Dunia II dengan saling mengancam dan menggertak. Saling pamer senjata pemusnah masal berhulu ledak nuklir. Dunia terancam perang nuklir. Kematian global membayangi umat manusia.

Tapi, dekonstruksi datang pada akhir dekade 1980. Melalui Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir US. Sungguh tak terbayang pada masa itu. Dunia terbebas dari perang hanya dengan dua kata: “*glasnost*” (keterbukaan) dan “*perestroika*” (restrukturisasi). Bipolar antara Blok Barat yang kapitalis dan Blok Timur yang komunis runtuh. US, yang didirikan pada 1922, membubarkan diri pada 1991. Rusia, pilar utama US, menjadi negara sendiri. Tembok Berlin jebol. Jerman Barat dan Timur bersatu kembali.

Tiongkok juga mereformasi diri. Mengikuti resep modernisasi Deng Xiaoping. Demikian pula AS dan sekutunya. Kebijakannya berubah. Termasuk kepada negara-negara mantan Blok Timur. Juga kepada negara-negara yang merdeka pasca-perang. Termasuk Indonesia.

Dunia tersenyum, gembira ria. Tapi, ilmuwan politik asal AS, Samuel P. Huntington, pada 1992 mengingatkan dunia. Dia memaparkan teori “benturan peradaban” (*clash of civilizations*) saat pidato di *American Enterprise Institute*. Katanya, identitas budaya dan agama akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca-Perang Dingin.

Semula saya tak percaya. Tapi, modus baru konflik dunia ternyata mendekati teori Huntington. Jalan peperangan berlanjut. Karena identitas budaya dan agama. Dan, makin krusial tatkala bercumbu dengan kapital.



Apakah Covid-19 akan mengakhirinya? Entahlah. Yang jelas, setiap angka kematian karena Covid-19 adalah wajah. Sama, setiap angka kematian akibat perang adalah wajah. Dan, wajah-wajah itu terus-menerus menatap kita. Hingga kita memastikan tak ada lagi kematian seperti mereka. Karena tata dunia baru yang saling melindungi dan mengamankan antarbangsa, antarmanusia. Semoga!

*15 April 2020*



# Tanpa Mudik

**S**ungguh menjengkelkan. Covid-19 bukan cuma menghentikan Snapas seseorang. Makhluk super kecil itu di Indonesia juga memaksa pemerintah melarang mudik. Menarik buat saya (sebagai antropolog). Peristiwa langka, fenomena baru bagi kebudayaan Indonesia.

Mudik sudah menjadi tradisi khas di Indonesia. Dimiliki seluruh segmen sosial. Ya pegawai, pedagang, buruh, majikan dan segmen sosial lain. Ya muslim abangan, santri, bahkan non-muslim. Seolah-olah keharusan. Yang tak tergantikan oleh media apapun. Meski biayanya tak murah. Saya pun selalu menjalaninya bersama keluarga.

Entah sejak kapan mentradisi. Saya menduga sejalan dengan perubahan sosial pada abad ke-20. Tatkala sistem kapitalisme berangsur-angsur menggantikan sistem pertanian tradisional

(subsisten). Clifford Geertz, antropolog yang populer karena kajiannya tentang Jawa dan Bali, menyebutnya “involusi pertanian”. Terjadi penyempitan lahan pertanian tradisional pada satu sisi. Pada sisi lain sektor pertanian modern gagal menyerap ledakan angkatan kerja di pedesaan.

Lalu, berlanjut secara intensif pada masa pembangunan era Orde Baru. Kota-kota metropolis muncul sebagai pusat modernisasi (industrialisasi). Juga kota-kota satelitnya. Pada sisi lain program Revolusi Hijau justru menyingkirkan petani dari lahan mereka. Tak ada pilihan lain kecuali migrasi. Kota lalu menjadi kantong ekonomi baru. Baik di sektor formal maupun informal.

Sejak itulah, setiap menjelang Lebaran, orang-orang udik pulang kampung. Jumlahnya terus bertambah. Mengikuti laju perubahan sosial. Pada 2019 jumlah pemudik mencapai 18 juta lebih. Itu yang tercatat melalui Angkutan Lebaran. Belum pemudik dengan kendaraan pribadi.

Maka, masuk akal bila tradisi mudik dibaca secara ekonomi. Dampak ekonominya sangat besar dan luas. Kita paham pula dilemanya. Maju kena, mundur kena. Melarang mudik beresiko menghantam ekonomi. Tapi, membiarkan mudik sama dengan melapangkan jalan Covid-19 menemukan mangsa. Sama dengan *setor nyawa*.

Di Indonesia Covid-19 telah membunuh 720 jiwa per 26 April 2020. Yang terinfeksi 8.607 orang. Angkanya masih cenderung naik. Mencemaskan sekali. Jauh di atas angka kematian akibat lakalantas mudik Lebaran. Yang juga mencemaskan. Tahun 2018 mencapai 318 jiwa, turun di angka 133 pada 2019.

Orang-orang udik semacam ada ikatan kuat dengan kampung halaman. Saya pun merasakan. Sudah tiga puluh tahun ber-KTP Jember, membangun keluarga di Jember, tapi masih merasa orang Blitar. Anak saya pun bingung. Baginya, mudik bukan

pulang ke kampung halaman. Tapi, pergi ke kampung/desa asal orangtuanya.

Bagi orang-orang udik, tempat mengais rezeki bukanlah kampung halaman. Meski mereka mendirikan rumah tangga di sana. Kampung halaman tetaplah desa tempat mereka dilahirkan. Di tempat baru, mereka menganggap (dianggap) “numpang”. Disebut (menyebut diri) “pendatang”. Dunia yang dihayati tetaplah kampung halaman. Yang jauh dari keseharian.

Maka, mudik akan mendekatkan antara “dunia keseharian” dan “dunia yang dihayati”. Keluarga pemudik akan berkumpul di rumah orangtua. Posisi orangtua di kampung halaman sangat penting. Guna mengumpulkan “*balung pisah*”, menyatukan anggota keluarga yang terpencar di berbagai tempat.

Peristiwa tersebut mengingatkan saya pada istilah “*somah*”, sistem pertalian kekeluargaan Jawa. Juga ungkapan Jawa: “*mangan ora mangan yen ngumpul*” (makan atau tidak, asal berkumpul). Meski setiap anggota keluarga sesungguhnya merupakan pribadi mandiri. Perubahan sosial memaksa mereka meninggalkan kesatuan dasar keluarga, *somah*. Hubungan dan kesatuan keluarga (sementara) terputus oleh jarak geografis dan sosial. Yang kelak dipulihkan kembali dengan mudik Lebaran, lalu *ngumpul*.

Mereka menikmati hidangan khas kampung. Cerita masa lalu, juga masa kini tentang si A, B, dan sebagainya. Mengikuti Radcliffe-Brown, antropolog pelopor mazhab fungsionalisme-struktural, mudik Lebaran memenuhi fungsi menjaga kesatuan masyarakat, fungsi integrasi sosial.

Tapi, pada sisi lain, budaya konsumsi yang dipandu oleh kapitalisme (pasar) dewasa ini tak mungkin diabaikan. Tradisi mudik telah pula dicumbui modal. Hiruk-pikuk mudik justru akibat tendensi modal. Yang telah pula mencumbui kegiatan ritual sepanjang Ramadan.

Pasar justru makin hidup di bulan Ramadan. Pasar tradisional, pasar modern, bahkan “pasar kaget”. Justru makin ramai di bulan Ramadan. Barang dagangan bertambah, melimpah. Mulai dari kebutuhan pokok, beribadah, sampai barang mewah. Sebagian terkait dengan citra sosial (penampilan).

Lihatlah, penjualan mobil selalu meningkat menjelang Lebaran. Mobil baru maupun bekas. Waktu belanja di pasar pun ditambah. Obral diskon, promo dan iming-iming lain. Serba menggiurkan konsumen. Kita pun makin sulit membedakan mana “kebutuhan” dan mana “keinginan”. Yang profan menghimpit yang sakral. Di sepanjang Ramadan.

Di pelukan budaya konsumsi seperti itu, tradisi mudik dapat pula bermakna “panggung”. Yang memamerkan banyak hal: kesuksesan, kemajuan, kekayaan, kemenangan. Beroposisi biner dengan kampung/desa: kegagalan, ketertinggalan, kemiskinan, kekalahan.

Diam-diam Covid-19 membongkar makna-makna tersebut. Profanisasi Ramadan dihentikan. Pasar kian sepi. Tak lagi provokatif. Tak lagi menghimpit yang sakral. Kita pun tak lagi *kemrungsung* mudik hanya untuk menemukan *somah*. Yang secara nyata sudah hilang. Tinggal ilusi.

Kita kehilangan panggung. Tempat pamer kesuksesan, kemajuan, kekayaan, kemenangan. Yang ternyata citra belaka. Yang tak jarang menutupi realitas kegagalan, ketertinggalan, kemiskinan, kekalahan. Di dunia sehari-hari.

Tanpa mudik (karena Covid-19) kita tumbuh dalam kehidupan yang lebih jernih. Yang lebih realistis, bersahaja. Kita akan belajar kembali cara berkonsumsi. Mengenali secara cerdas mana kebutuhan dan mana keinginan. Merajut makna baru yang mencerahkan. Demi hari esok yang lebih baik.

# Ambyar

**B**erita duka itu tiba-tiba sekali. Bagaikan Covid-19. Menjemput maut secara masal tanpa suara. Oh, *The Godfather of Broken Heart*, Didi Kempot, pergi untuk selamanya. Ambyarlah Sobat Ambyar. Yang tua, muda. Yang laki-laki, perempuan. Yang kaya, miskin. Yang orang kota, orang desa. Yang muslim, non-muslim. Yang Jawa, non-Jawa.

Di pertengahan April 2020 Didi Kempot masih manggung. Lagu *Banyu Langit*, *Kalung Emas*, *Pamer Bojo* masih menyihir Sobat Ambyar. Kerja bareng *KompasTV* secara WFH (*Work From Home*). Model kerja yang populer akibat pandemi Covid-19.

Konsernya diberi tajuk “Konser Amal dari Rumah”. Diselenggarakan untuk mengumpulkan donasi demi penanggulangan Covid-19. Makhluk super kecil itu ganas sekali. Di Indonesia telah menelan 930 jiwa per 8 Mei. Konser Amal dari Rumah spektakuler. Konon

berhasil mengumpulkan donasi Rp. 7,6 miliar. “Jangan mudik,” pesan sang *Godfather*. Tapi, tanpa tanda Didi Kempot malah “mudik” ke yang asli.

*Kompas TV* benar. *The Godfather of Broken Heart* pilihannya. Tak ada penyanyi Indonesia yang ketenarannya melebihi Didi Kempot dalam setahun terakhir. Musik dan lagu-lagunya menyihir berbagai kalangan. Menembus batas usia, bahasa, gender, sosial, etnis, agama. Didi Kempot sangat fenomenal. Tahun 2019 menjadi miliknya.

Bayangkan! Dia adalah generasi saya, lahir 1960-an. Tapi, digandrungi generasi anak saya, anak milenial, yang pada umumnya berbahasa ibu bahasa Indonesia. Lahir 1990 - 2000-an, saat Didi Kempot sudah populer setelah menjelajahi “seribu kota” (lagu *Sewu Kutho*).

Didi kempot mengawali kariernya sudah dengan kekhasan. Menjadi pengamen di Stasiun Balapan, Solo. Kelak menginspirasi, jadilah lagu *Stasiun Balapan*. Memilih campursari, meski agak beda dengan generasi Manthous. Genre musik *ndesa*, pinggiran. Bukan musik arus utama (*mainstream*). Berbahasa Jawa. Berkostum tradisi Jawa. Cara jogetnya pun khas Jawa. Direkam dengan teknologi sederhana di zaman VCD/DVD. Dipasarkan melalui lapak kaki lima. Tak berkelas.

Tapi, dunia bergerak. Teknologi berubah. Muncul ekosistem baru berbasis teknologi digital. Kaum ahli menyebut “Era 4.0”. Internet dan segenap produk turunannya muncul. Model literasi pun berubah. Teknologi digital menawarkan literasi yang memadukan antara aksara, suara, dan gambar hidup (video). Ada *YouTube*, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp* dan jenis media sosial lain.

Berkat teknologi digital, dunia akan mengalami transformasi secara radikal. Cara kerja berubah. Nilai-nilai pun berubah.



Banyak profesi dan pekerjaan kelak digantikan mesin aplikasi, atas nama efisiensi dan efektivitas. Akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi, diperkirakan akan muncul model profesi, pekerjaan dan bisnis baru. Entah seperti apa? Inilah “disrupsi” (*disruption*), ketercerabutan kelembagaan dan nilai-nilai dalam berbagai bidang kehidupan.

Tapi, sejumlah kalangan percaya, transformasi tersebut juga menjanjikan bentuk-bentuk komunitas baru. Yang lebih partisipatif dan egaliter. Teknologi digital diyakini akan meruntuhkan pola hirarkis oposisi biner yang telah mapan. Seperti, pusat : pinggir, kota : desa, modern : tradisional, maju : terbelakang, laki-laki kuat : perempuan lemah. Ambyarlah kemapanan oposisi biner itu. Lalu, digantikan lanskap baru yang memungkinkan tumbuh banyak pusat/subjek. Bukan berpola hirarkis, tapi kolaboratif antarpusat/subjek.

Fenomena Didi Kempot, di mata saya, adalah anak kandung ekosistem digital. Kekhasan campursarinya kolaborasi secara kreatif dengan genre lain. Ada warna dangdut koplo yang juga khas dan fenomenal. Meski Didi Kempot tak beranjak dari tema-tema kepiluan yang menyayat hati. Rupanya tema-tema itu cocok dengan kejiwaan anak-anak milenial yang suka galau. Apalagi Didi Kempot melawan ideologi patriarki. Laki-laki biasanya digambarkan gagah dan kuat, tapi sebaliknya di mata Didi Kempot.

Lalu, media sosial, yang juga bawaan ekosistem digital. Terbukti media sosial telah menggeser peran media arus utama. Yang selama ini berjarak dengan Didi Kempot. Karena dianggap pinggiran, lokal, bukan genre musik arus utama. Dan, Didi Kempot membuktikan. Kefenomenalannya bukan kerja media arus utama. Tapi, bermula dari video unggahan penggemar milenial yang viral di media sosial pertengahan 2019.

Di lanskap baru itulah Didi Kempot tumbuh sebagai pusat/ subjek. Didi Kempot mengambyarkan kemapanan. Memperlihatkan tata kehidupan baru, nilai-nilai baru, optimisme baru, harapan baru. Dan, Konser Amal dari Rumah, yang merupakan konser pungkasanya, meneguhkan hal-hal baru itu.

Saya terharu, juga bangga. Kepergian Didi Kempot meninggalkan kebaruan. Yang semula dianggap lokal, tradisional, pinggiran, *ndesa*, tak bisa lagi diremehkan. Kemapanan lama ambyar, bak *cendol dawet*. Saya termenung, ternyata Didi Kempot serupa dengan Covid-19: mengambyarkan kemapanan. Karena Covid-19, mobilitas yang didewakan dalam peradaban lama ambyar. Dipukul hukum “jaga jarak”. Kuat sekali relasi interteks antara teknologi digital, Didi Kempot, dan Covid-19. Konser Amal dari Rumah Didi Kempot membuktikannya.

Bila teknologi digital membawa disrupsi, maka Covid-19 lah *the real disruption*. Covid-19 adalah gangguan nyata bagi tatanan lama. Ambyarlah. Kini kita mulai akrab dengan WFH dan segenap turunannya. Kita pun mulai fasih dengan istilah *meeting online*, *video conference*, *webinar* (web seminar). Kita juga mulai mengenal piranti seperti *Zoom*, *Skype*, *Google Meet*. Ingat, baru memulai.

Tak terbayang apa yang terjadi bila Covid-19 menyergap dunia di awal 2000, lalu kita harus WFH? Anarki barangkali. Covid-19 menyergap di waktu yang tepat. Tatkala kita sedang bersiap memasuki tata kehidupan baru. Covid-19 mempercepatnya. Didi Kempot mengawalinya. Sayang dia keburu “mudik”. Saya pun *wurung* menghadirkannya di Kampus Merah-Putih untuk memberi kuliah umum mahasiswa baru 2020. Ambyar!

9 Mei 2020

# Kebangkitan 2020

**G**ubernur Jenderal Idenburg gelisah. Ditatapnya peta besar di tembok kantornya. Sebuah peta “dari Sabang sampai Merauke” yang dipasang pendahulunya, Van Heutsz. Itulah peta jajahan negaranya. Yang luasnya berkali-kali lipat luas negaranya. Keragamannya pun berkali-kali lipat keragaman negeri Belanda.

Sang gubernur jenderal berpikir keras. Mencari cara baru. Model penaklukan warisan Van Heutsz dianggap tak cocok. Meski pendahulunya itu sukses “menyatukan” wilayah Sabang sampai Merauke menjadi jajahan Belanda.

Berat bagi Idenburg. Yang memulai kekuasaannya pada 1909, tatkala bumiputra mulai bergerak. Yang dihadapi bukan lagi orang-orang bersenjata keris, tombak, golok, parang. Yang tentu akan kalah dengan pistol, bedil, meriam.

Idenburg menghadapi orang-orang dengan senjata kata-kata. Yang menunjukkan kesadaran baru, semangat baru, cara pandang baru, aksi perlawanan baru. Idenburg tahu persis kata-kata baru itu – *boikot, mogok, kemajuan, partai, rapat umum, ideologi, bangsa, merdeka* – makin fasih diucapkan oleh kaum bumiputra. Dia juga tahu kedahsyatan surat kabar *Sin Po, Medan Prijaji*. Yang menjadi asupan otak kaum bumiputra setiap hari. Pun pengaruh sosial politik organisasi Boedi Oetomo, Sjarekat Dagang Islam (lalu Sjarekat Islam). Idenburg paham betul. Itulah anak kandung kebijakan etis pemerintahnya.

Maka, benar Bung Karno. Kata proklamator yang mudanya digembleng di Sjarekat Islam, “Sabang sampai Merauke” bukan sekadar istilah ilmu bumi. Tapi, konsep geopolitik. Di sana lah terbentuk kesatuan nasional, kesatuan cita-cita sosial, kesatuan kenegaraan, dan kesatuan ideologi. Ujungnya adalah komunitas baru bernama “bangsa Indonesia”. Yang mencari kemerdekaannya. Dengan kelengkapan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka, kebangkitan nasional tak lain adalah politik dekonstruksi. Aksi pendobrakan tatanan lama, lalu digantikan tatanan baru. Kebangsaan Indonesia adalah komunitas baru, pengisi tatanan baru, dengan segenap nilai-nilai yang melekat di dalamnya.

Berakhirkah urusannya? Tidak! Kebangsaan Indonesia akan selalu ditantang zaman. Dan, hari ini kebangsaan kita berada pada tatapan sejarah baru. Pada satu sisi tatapan ekosistem baru berbasis teknologi digital. Yang berbeda sekali dengan ekosistem yang membidani lahirnya bangsa Indonesia. Pada sisi lain tatapan pandemi Covid-19. Yang merobohkan banyak hal kehidupan sebelumnya. Teknologi digital dan Covid-19, dua hal yang kelihatan terpisah, tapi berelasi dan menantang kebangsaan kita.

Ekosistem digital telah hadir dan menjadi realitas baru. Dunia mengalami digitalisasi. Tinggal seluas gawai (*gadget*). Lalu, ditaruh di saku, dibawa ke mana-mana. Tapi, kita mesti hati-hati, skeptis-kritis.

Ekosistem digital memang menjanjikan komunitas baru. Yang lebih partisipatif, egaliter. Yang menguatkan prinsip kebangsaan Indonesia. Melalui teknologi digital, manusia sebagai subjek digital menemukan kebebasan. Kita bisa berselancar secara bebas. Termasuk kebebasan politik. Anda tentu pernah berkomentar di media sosial terhadap konten tertentu. Atau, ikut menyebarkan konten itu. Atau, mengintip saja. Apakah berarti Anda telah menjadi subjek otonom?

Subjek digital dalam lanskap kapitalisme global boleh jadi hanyalah noktah. Data kecil dalam gugusan data besar (*big data*). Jangan-jangan kebebasan kita yang dimanjakan oleh media sosial bukan otonomisasi subjek. Tapi, penyerahan diri secara sukarela sebagai bahan *big data*. Ujungnya bisa ekonomi. Bisa pula politik. Secara ekonomi demi surplus modal. Secara politik untuk politik elektoral.

Masih segar dalam ingatan, perang konten pilpres 2019 di media sosial. Saya yakin konten-konten itu diproduksi oleh tim media masing-masing capres. Dengan memanfaatkan *big data*. Tim 01 memainkan narasi “nasionalisme”. Melawan narasi “populisme Islam” yang dimainkan tim 02. Ternyata kita sekadar pengikut (*followers*) masing-masing. Yang kita lakukan ternyata hanya menerima konten. Lalu, membacanya, memberi komentar sedikit-sedikit. Baik melalui kata-kata maupun sekadar ikon emosi (jempol, tepuk tangan, tertawa, dll), lalu *share*. Para pemilik gawai ternyata berpikir dan bertindak di dalam *trend* atau *frame*. Dikontrol sekelompok kecil orang. Pun emosinya.

Kebangsaan menemukan tantangan baru. Dulu batas primordial lumer dalam komunitas “bangsa” (*nation*). Kini ekosistem

digital potensial menumbuhkan primordialisme. Politik identitas begitu gampang dimainkan. Dari dunia maya, lalu nyata. Terutama soal agama. Sangat mungkin berkombinasi dengan ras/etnis. Sangat mungkin pula berkolaborasi dengan modal. Sungguh ancaman baru bagi kebangsaan Indonesia. Maka, kesadaran kritis subjek digital memainkan peran penting. Kesadaran kritis harus ditumbuhkan di era ekosistem digital.

Makin menarik, tantangan baru kebangsaan datang dari Covid-19. Sudah hampir setengah tahun (enam bulan) dunia babak belur dihajar Covid-19. Kita merasakannya sejak awal Maret. Tapi, belum ada tanda-tanda reda. Angkanya masih terus membubung. Di Indonesia 18.010 orang dinyatakan positif terinfeksi. Data per 19 Mei. Yang meninggal dunia 1.191 orang.

Dampaknya luar biasa. Kebijakan memotong rantai penyebaran Covid-19 memukul banyak aspek kehidupan. Peradaban dan tatanan lama ambyar. Tak berdaya digempur hukum *social distancing*.

Saya melihat momentum kebangkitan 2020. Bukan hanya berskala nasional, tapi global. Peluang bersama bangsa-bangsa di dunia. Untuk naik ke level kesadaran lebih tinggi. Yakni, kemampuan kerja sama global dalam kreativitas saling peduli, saling menyelamatkan. Situasi menuntut gerak bersama. Demi keselamatan bersama. Bukan insting survival egoistik masing-masing kelompok/bangsa. Yang hanya demi keselamatan sendiri.

Saya lalu teringat ajaran Bung Karno. Katanya, nasionalisme akan tumbuh subur bila hidup di taman sari internasionalisme. Demikian pula internasionalisme tak dapat tumbuh tanpa berakar di bumi nasionalisme. Ternyata kita melihat diri kita hanya dari dalam diri orang lain. Meski dia tetaplah bukan kita.

# Kenormalan Baru

Catatan ini saya abdikan untuk mengenang 1 Juni 1945. Berdasarkan Keppres 24/2016, 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Sebelumnya negara enggan mengakuinya. Mungkin karena politis. Dengan pertimbangan jernih dan pendekatan politis jitu, Presiden Joko Widodo berhasil menetapkannya.

Tapi, *kok* judulnya “Kenormalan Baru” (*new normal*)? Istilah ekonomi bisnis itu pertama kali dikenalkan Rich Miller dan Matthew Benjamin pada 2008. Kini sangat populer. Disebut-sebut tatkala pandemi Covid-19 tak jelas ujungnya. Saya melihat benang merah di antara keduanya.

Pada 1 Juni 1945 Soekarno berpidato di sidang BPUPK. Menjawab pertanyaan Ketua BPUPK, Radjiman Wedyodiningrat. Di pembukaan sidang, Radjiman bertanya apa dasar negara

Indonesia merdeka. Soekarno menjawab. Dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila. Bukan agama, bukan kapitalisme, bukan pula komunisme. Dijelaskan Soekarno, bila Pancasila tidak disetujui, ditawarkan Trisila: Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, dan Ketuhanan. Bila Trisila belum juga diterima, ditawarkan Ekasila: Gotong Royong. “Tetapi terserah kepada Tuan-Tuan, mana yang Tuan-Tuan pilih: Trisila, Ekasila, ataukah Pancasila,” tegasnya.

Bukankah esensi pidato Soekarno itu kenormalan baru? Situasi yang sebelumnya tidak biasa, lalu (kini) menjadi biasa, bahkan diharapkan. Dari sudut rakyat jajahan, kemerdekaan adalah jalan menuju kenormalan baru. Secara metaforis Soekarno menyebutnya “jembatan emas”. Di seberang jembatan itulah hendak dibangun rumah baru berpondasi Pancasila. Selamat tinggal cara hidup normal zaman kolonial. Selamat datang kenormalan baru berdasarkan Pancasila. Meski, harus menunggu dunia babak belur oleh Perang Dunia II.

Kini, dunia juga babak belur. Dihajar Covid-19. Sejak awal 2020. Dia tak pilih-pilih. Baik terhadap negara kaya maupun miskin. Negara maju maupun berkembang. Segenap kekuatan dikerahkan. Diterapkanlah *social distancing*. Meski, ongkosnya sangat mahal. Karena membatasi mobilitas manusia. Yang akibatnya melumpuhkan ekonomi negara dan warga. Tapi, Covid-19 tak bergeming. Masih terus menyergap. Membunuh tanpa ampun. Dan, tatkala kita keluar rumah, kita mendapati tetangga baru kita ternyata Covid-19.

Tak ada cara lain. Kita harus beradaptasi dengannya. Memulai cara hidup baru di tengah pandemi yang tak berujung. Kembali beraktivitas layaknya hidup normal, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap bermasker, rajin cuci tangan, jaga jarak, memastikan diri sehat. Itulah kenormalan baru masa pandemi.



Saya mengerti betapa sulit. Bisa dimengerti pula yang keberatan dan khawatir. Tapi, roda kehidupan juga harus berputar. Gawat juga bila berhenti terlalu lama. Sungguh ujian berat. Bagi pemerintah dan rakyat. Butuh kedisiplinan, ketertiban, kerja sama, dan saling percaya.

Tapi, apakah hakekat kenormalan baru itu sekadar adaptasi perilaku sehat di masa pandemi? Kenormalan baru, saya kira, perlu dilihat secara utuh sebagai sistem sosial. Bukan sekadar adaptasi temporer. Kenormalan baru adalah keniscayaan sejarah. Cepat atau pun lambat. Beriringan dengan perubahan ekosistem dunia.

Mari kita lihat yang paling menonjol: WFH (*work from home*). Hukum *social distancing* mengharuskan WFH. Tiba-tiba kita harus bekerja secara daring, virtual. Belajar pun daring. Dari rumah saja. Awalnya gagap. Tapi, berjalan juga. Bahkan, tahu positif-negatifnya.

Sebelum pandemi, WFH tentu dianggap tidak normal, aneh. Seorang karyawan bekerja dari rumah pasti dimarahi bos. Meski, hasil unjuk kerjanya bagus. Apakah di kenormalan baru WFH ditinggalkan? Pun ketika pandemi berlalu?

Tidak! Mengapa? Dunia sedang bergerak mengikuti lanskap baru ekosistem digital. WFH dimungkinkan dan berjalan saat pandemi, karena teknologi digital mendukung. Teknologi digital terbukti telah mengambil alih sebagian urusan manusia. Sebelum maupun saat pandemi.

Maka, model kerja virtual adalah keniscayaan. Dia akan menjadi salah satu pilihan. Bukan karena *social distancing* lagi. Tapi, nilai ekonomi. Saya yakin banyak perusahaan, kantor, sekolah, lembaga lain mulai berhitung. Menerima model kerja virtual sebagai kenormalan baru. Merencanakan beralih ke kantor virtual. Bisa sebagian besar pekerjaan. Atau, sebagian kecil saja.

Kelak WFH bervariasi, misalnya WFC (*work from cafe*). Saya pun normal ikut webinar dari kafe.

Kinerja ekonomi perdagangan membuktikan. Konon, nilai ekonomi digital Indonesia 2019 mencapai US\$ 40 miliar (Rp. 568 triliun). Diperkirakan akan tumbuh sampai US\$ 130 miliar pada 2025. Bukan angka kecil.

Peralihan model kerja itu sangat berdampak. Dilihat dari kehidupan normal. Mobilitas manusia akan menurun. Kemacetan jalanan berkurang. Ada efek domino efisiensi: energi (listrik, BBM), infrastruktur (bangunan, jalan, dan lainnya), lingkungan hidup. Ujungnya efisiensi belanja negara.

Tapi, dampak ketenagakerjaan juga serius. Akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi, saya yakin, akan muncul keseimbangan (sistemik) baru. Ada yang pergi, ada yang datang. Nilai efisiensi tadi dapat menjadi sumber daya baru. Untuk menciptakan pekerjaan baru dan manfaat baru lain. Inilah “disrupsi” yang disebut dalam Era 4.0. Ini pula esensi kenormalan baru di mata saya.

Maka, bagi Indonesia, kenormalan baru mesti dibaca dari perspektif Pancasila. Ada titik krusial menuju keseimbangan baru. Yang butuh teropong Pancasila. Butuh kritik ideologis. Agar keseimbangan baru nanti mengarah pada keadilan sosial. Agar kenormalan baru nanti menjamin kesejahteraan sosial secara merata. Mengukuhkan persatuan-kesatuan. Bukan malah memproduksi dominasi, eksploitasi, penindasan, dan kerawanan sosial baru. Proses kenormalan baru haruslah bermakna pembumian Pancasila. Bukan imperialisme virtual, “neo-imperialisme baru”.

Soekarno mengingatkan. “Imperialisme, tua maupun modern, bukanlah pemerintah, bukanlah bangsa asing, bukanlah kaum amtenar, bukanlah badan atau materi apapun juga, imperialisme adalah nafsu dan sistem belaka... Nafsu dan sistem yang serakah,” ujarnya di *Indonesia Menggugat*.

Selamat datang kenormalan baru di bumi Pancasila. Kita sambut dengan optimisme-kritis.

*1 Juni 2020*



## Ratu Adil, Trisila...

**T**etapi terserah kepada Tuan-Tuan, mana yang Tuan-Tuan pilih: Trisila, Ekasila, ataukah Pancasila,” kata Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Kata *trisila* dan *ekasila* tiba-tiba populer. Mengundang polemik. Gara-gara muncul di RUU Haluan Ideologi Pancasila. Persis setelah hari lahir dan menjelang haul Soekarno.

Pukul 07.00 WIB, 21 Juni 1970. Dokter keluar ruangan. Tanpa bicara. Hanya menggelengkan kepala. Putra-putri Soekarno bergegas masuk ruangan. Di pembaringan sang ayah tergolek lemah. Megawati mendekat, membisikkan kalimat syahadat. Tapi, hanya satu kata yang terucap lirih: “Allah”.

Soekarno wafat. Setelah melewati hari-hari terakhir yang berat. Sejak diturunkan sebagai presiden, Soekarno bagaikan

orang buangan. Diperlakukan sebagai tahanan politik. Diasingkan dari keluarga, kawan, dan bangsa yang dicintainya.

Sehari kemudian jasad Soekarno dikirim ke Blitar. Wasiatnya untuk dimakamkan di Bogor ditolak penguasa. Bogor dinilai terlalu dekat pusat kekuasaan, Jakarta. Tak menguntungkan secara politik. Di kota yang lekat dengan nama pahlawan Soeprijadi itulah jasad Soekarno dikebumikan. Berdampingan dengan kedua orangtuanya.

Beruntunglah masyarakat Blitar. Ternyata kemanfaatan Soekarno bukan saat hidup saja. Setelah wafat pun makamnya tak pernah putus mengalirkan berkah. Orang berdatangan dari pelosok negeri. Bukan saat haul saja. Tapi, setiap hari. Meski penguasa bikin kebijakan desoekarnoisasi. Makam Soekarno menghidupi banyak orang, terutama *wong cilik*, hingga kini. Sebuah semiotika alam.

Tak aneh dari sisi antropologi. Kosmologi masyarakat Indonesia yang religius selalu mempertautkan seseorang dengan dunia adikodrati. Tak banyak makam seseorang yang dikunjungi banyak orang. Hanya orang-orang khusus. Yang punya jasa besar, keutamaan, kelebihan (*linuwih*). Yang jasa dan keutamannya dirasakan banyak orang. Soekarno masuk kategori ini.

Peran historisnya sangat kuat. Jejak sebagai pejuang kemerdekaan jelas sekali. Sepak terjangnya sejak muda selalu melawan kolonialisme-imperialisme. Bukan memusuhi Belanda. Tapi, sistem yang menjadi sumber ketidakadilan dan kemiskinan rakyat. Sumber kemerosotan harkat, martabat, dan jiwa rakyat.

Di *Indonesia Menggugat*, pledoi yang disusun dari balik jeruji penjara (1930), Soekarno menjelaskan dengan terang-benderang. Dia menolak tuduhan menggulingkan kekuasaan Hindia-Belanda. “Tak usah kami uraikan lagi, bahwa proses ini adalah proses politik...,” tegas Soekarno mengawali pledoinya.

Dia membentangkan kejahatan-kejahatan kolonialisme-imperialisme: suatu paham, sistem, politik penaklukan negeri lain, yang menindas dan menyengsarakan rakyat. “Yang membuat susunan pergaulan hidup negeri/rakyat Indonesia kocar-kacir,” kata Soekarno.

Karena penindasan dan kesengsaraan itulah rakyat jajahan bermimpi akan datang Ratu Adil. Siapa Ratu Adil? Semacam “ideologi” yang menyemangati dan menggerakkan perlawanan lokal, terutama kaum tani. Prof. Sartono Kartodirdjo memaparkannya dalam buku *Pemberontakan Petani Banten 1888*.

Soekarno pun membaca Ratu Adil secara semiotik. Bukan sosok manusia, tapi sistem kehidupan. Yang menyejahterakan, membahagiakan. Bukan buat satu orang dan golongan saja. Tapi, semua orang dan golongan. Kemerdekaan adalah jembatan emas ke sana.

Maka, saat mendapatkan giliran bicara pada sidang BPUPK, Soekarno menawarkan pikirannya. Disampaikanlah konsep dasar negara yang diminta Radjiman Wedyodiningrat. Di pembukaan sidang, Ketua BPUPK itu bertanya apa dasar negara Indonesia merdeka.

Benang merah pikiran Soekarno sangat jelas. Mimpi rakyat tentang Ratu Adil disebut kembali pada pidato 1 Juni 1945. “*Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil,*” ujarnya.

Dunia baru, sistem baru, yang membuat rakyat hidup sejahtera, hidup bahagia. Gagasan besar tentang sistem kehidupan baru itulah yang diuraikan Soekarno. Siapapun yang memimpin Indonesia, sistem tersebut akan mengarahkan kepemimpinannya. Menuju kehidupan yang menyejahterakan, yang membahagiakan.

Soekarno menjelaskan detail yang dimaksudkan itu dengan sebutan Pancasila: kebangsaan, internasionalisme/perikemanusiaan, mufakat/demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Lima prinsip (nilai), yang menurut Soekarno digali dari bumi Indonesia, sebagai dasar negara *sekaligus falsafah (pandangan hidup) bangsa*.

Tentu lima prinsip yang disebut Pancasila itu bukanlah konsep sederhana. Soekarno pun menyadarinya. Terbukti dia membuka gagasannya. Berusaha menjelaskan secara gamblang dan sederhana. Agar mudah dipahami dan diingat. Dirujuklah pikiran yang pernah dikemukakan saat muda. Yakni, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme menjelaskan prinsip kebangsaan dan internasionalisme/perikemanusiaan. Sosio-demokrasi menjelaskan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Ditambah prinsip ketuhanan, jadilah yang disebut Trisila.

Konsep Trisila disederhanakan lagi. Soekarno menawarkan dengan istilah yang khas, yakni gotong royong. Praktik gotong royong itulah gambaran sederhana sistem kehidupan yang ditawarkan. Yang dilihat Soekarno sebagai perwujudan paling nyata dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. “*Holopis-kuntul-baris* buat kepentingan bersama,” kata Soekarno. Disebutlah Ekasila.

Dari Pancasila menjadi Trisila, lalu Ekasila. Jelas suatu tawaran (pilihan) konseptual. Dan, ternyata pilihan yang disepakati semua jatuh pada Pancasila. Rumusannya lalu dimatangkan. Soekarno memimpin pematangan itu. Tersusunlah Piagam Jakarta 22 Juni. Lalu, mengalami pematangan lagi. Hingga rumusan final 18 Agustus 1945, yang dicantumkan di Pembukaan UUD 1945. Soekarno pula yang memimpin.

Maka, rumusan di Pembukaan UUD 1945 itulah yang resmi. Terutama untuk kepentingan resmi kenegaraan dan pemerintahan. Namun, harus pula dimengerti dan diterima bahwa rumusan



final dan formal itu bukan tiba-tiba. Prosesnya merupakan bagian penting pemahaman Pancasila. Saya kira, Keppres 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila sudah mengarahkannya.

Lima puluh tahun lalu Soekarno menutup mata. Selamanya. Mari kita kenang jasa dan keutamaannya. Kita segarkan pikirannya. Secara jernih dan terbuka. Untuk kejayaan bangsa.

*20 Juni 2020*



## Menunggu Lawan

Sudah dua mingguan. Baliho besar bergambar Ipuk Fiestiandani, istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menghiasi *tlatah* Banyuwangi. Di pojok bawah ditulis “Calon Bupati Banyuwangi 2020”. Di atas tengah terdapat *tagline* “MENJAGA KESINAMBUNGAN”. Berhuruf kapital semua.

Bu Dani, demikian sapaan populernya, selain dari Partai Nasdem, mengantongi rekomendasi dari PDI-P. Satu-satunya parpol di Banyuwangi yang boleh mengajukan pasangan calon tanpa koalisi dengan parpol lain. Maka, PDI-P menetapkan calon bupati dan wakilnya sekaligus. Bu Dani dipasangkan dengan Sugirah. Dia adalah kader PDI-P, bendahara partai. Sosok pekerja keras, tekun. Petani sukses. Haji Girah, demikian panggilan akrabnya, juga menjabat anggota DPRD Banyuwangi.

Kabar angin pencalonan istri Anas sebenarnya sudah berhembus lama. Hasil jajak pendapat *Radar Banyuwangi* pun mengunggulkannya. Saat memberikan sambutan pada Anugerah Inspiratif Untag Banyuwangi 2019 akhir Desember, Anas juga menyinggungnya. Disitirlah pesan Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat yang sukses memimpin Bandung. “Pak Anas, jangan menyesal seperti saya. Ketika saya meninggalkan Bandung, saya tidak membuat *agreement* dan tidak mencalonkan orang yang bisa melanjutkan visi saya,” ujarnya menirukan Ridwan Kamil.

Saya paham. Setiap pemimpin tentu ingin visinya berlanjut. Anas pun demikian. Harus memastikan kesinambungan visinya. Dia meyakini penjaga kesinambungan itu tak lain istrinya. Anas *cuek* terhadap isu politik dinasti. Saya paham. Tak ada aturan yang melarang. Biarlah rakyat yang menentukan. Rakyatlah pemilik kedaulatan. Kira-kira begitu dalilnya. Apalagi bukan yang pertama. Kabupaten Kediri, Probolinggo, dan Kota Batu telah mendahului.

Kini Bu Dani menunggu lawan. Hingga catatan ini saya buat belum muncul penantang pasti. Gus Munib baru diberi tugas DPP PKB untuk mencari calon wakil bupati sebagai mitra koalisi. Tokoh lain baru memasang gambar. Belum mengantongi rekomendasi parpol.

Banyuwangi memang spektakuler. Anas berhasil menyulapnya. Banyak perkembangan positif. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan. Dari 20,09 % (2010) tinggal 7,52 % (2019). Pendapatan per kapita naik signifikan. Dari Rp. 20,86 juta per orang per tahun (2010) menjadi Rp. 51,8 juta (2019). Kunjungan turis pun meningkat tajam. Turis domestik dari 654.602 orang (2010) menjadi 5,48 juta orang (2019). Turis mancanegara dari 16.977 orang (2010) menjadi 109.089 orang (2019).

Pantas banyak penghargaan diterima. Saya lalu teringat teorinya. “Kalau kita punya anak perempuan dilamar dua jejaka, yang satu satpam bergaji 10 juta, yang satu lagi baru lulus ITS, pilih mana? Tentu kita pilih yang baru lulus ITS. Karena punya prospek,” kata Anas empat tahun lalu saat kami pertama kali bertemu.

Banyuwangi terus bersolek. Anas berserta seluruh jajaran pemerintah dan warganya terus bekerja keras. Memprospek Banyuwangi. Melalui jalan (utama) pariwisata. Yang memang potensial dari aspek natur dan kultur. Banyak hal eksotik bisa dikapitalisasi. Anas merumuskannya ke dalam 20 jurus inovasi mengubah Banyuwangi. “Semua dinas adalah dinas pariwisata,” tuturnya menjelaskan jurus pertama. Jurusan-jurusan itu dikemas menjadi buku naratif-persuasif, lalu diklaim “anti mainstream marketing” (judul buku). Dengan klaim tersebut Anas hendak memperlihatkan derajat inovasi jurusan-jurusnya. Itulah paradigma Anas: model pembangunan Banyuwangi melalui jalan (utama) pariwisata. Kita sebut saja “*anasnomics*”.

Saya mengamini. Industri wisata melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Penikmat kue wisata sangat luas secara sosial. Industri wisata juga ramah lingkungan. Apalagi menghadapi ekosistem digital. Yang mulai mengambilalih urusan manusia.

Pariwisata diuntungkan oleh ekosistem digital. Kemolekan “api biru” kawah Ijen, misalnya, tak akan bisa dinikmati cuma melalui Youtube. Kelezatan *sega tempong* Mbok Wah dan kuliner Kemiren tak bisa dirasakan secara virtual. Orang harus datang. Media sosial menjadi sarana promosi ampuh: cepat, mudah, dan murah.

Namun, industri wisata ternyata tidak kebal serangan virus Covid-19. Semula dijagokan sebagai industri yang paling tahan banting. Kebal krisis ekonomi. Tapi, babak belur juga oleh

Covid-19. Pekerja industri wisata merana. Saya tidak punya angka pasti seberapa dampaknya. Yang pasti Banyuwangi pun merana.

Gunung Ijen kembali sunyi. Hotel, resto, bandara, stasiun, dan pusat oleh-oleh sepi. Agenda Banyuwangi Festival (B-Fest) berantakan. Padahal, B-Fest adalah lokomotif *anasnomics*. Sebuah persoalan baru. Masih manjurkah *anasnomics*? Buat Banyuwangi pascapandemi?

Maka, *tagline* Bu Dani, “menjaga kesinambungan” (berhuruf kapital semua), menarik disimak. *Tagline* tersebut menegaskan posisi *anasnomics*. Paradigma Anas hendak dilanjutkan Bu Dani sebagai *platform* pemerintahannya kelak. Saya mengerti. Menjaga kesinambungan boleh jadi adalah aspirasi utama rakyat Banyuwangi. Yang melihat dan merasakan keberhasilan Anas. Bukan kepentingan Anas saja. Maka, masuk akal bila keberhasilan itu harus berlanjut. Siapapun pengganti Anas.

Tapi, muncul pertanyaan kritis, dengan cara apa dan bagaimana akan dijalankan di masa pascapandemi? Tatkala pariwisata terbukti paling menderita akibat Covid-19? Di sinilah ruang adu gagasan. Menguji *anasnomics*. Masih bertuahkah buat menjaga kesinambungan? Tantangan buat Bu Dani maupun calon penantangannya.

Bahkan, saya kira, Bu Dani dan penantangannya bisa pula melupakan *anasnomics*. Bukan sekadar merevisi. Orang ada masanya. Masa ada orangnya. Pandemi Covid-19 terbukti membentuk realitas baru. Membutuhkan sudut pandang baru. Menantang daya imajinatif-kreatif-inovatif. Maka, menjaga kesinambungan bisa pula dimaknai bukan pada substansi *platform*-nya. Tapi, keberhasilannya, *jenggirat tangi*-nya. Publik kini menantang Bu Dani dan calon lawannya untuk menawarkan gagasan baru.

Banyuwangi lima tahun ke depan adalah Banyuwangi pascapandemi. Bukan sekadar *kebiasaan anyar*. Ditandai betapa virus mematikan bisa menyerang sewaktu-waktu. Era baru. Menunggu orang baru. Gagasan baru.

29 Juli 2020





## Merdeka dari C-19

**A**gustus tahun ini terasa senyap. Perayaan tanpa pesta. Saya pun menulis catatan ini menunggu detik-detik peringatan Proklamasi Kemerdekaan tiba. Hanya ingin mendapatkan momentum yang “super istimewa”.

Sungguh *new normal*. Memperingati Hari Kemerdekaan tanpa pekik “merdeka” yang membahana. Dari kampung ke kampung. Di seluruh pelosok negeri. Pun tak ada lomba-lomba. Tak ada selamatan kampung. Tak ada pidato-pidato. Tak ada panggung. Yang biasanya digelar hampir di setiap RT/RW.

Sang merah putih pun menaiki tiangnya di Istana Negara dengan sendu. Tanpa derap pengawalan Paskibra yang berbaris indah. Sang merah putih hanya dikawal tiga siswa (petugas) terpilih. Bukan formasi lengkap: 17-8-45.

Cara penghormatannya juga tak lazim. Baru kali ini upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan dilakukan di dalam jaringan virtual. Penghormatan kepada sang merah putih pun dilakukan secara virtual. Bukan hormat kepada sang merah putih. Tapi, kepada video sang merah putih yang bergerak menaiki tiangnya. Kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan mereka yang hadir di Istana Negara. Agustusan tahun ini benar-benar disandra Covid-19 (C-19).

Pagi hari pukul 09:00, sejak pandemi. Sering kali saya melihat anak-anak bermain bola di depan rumah. Sebagian berkejar-kejaran. Sebagian lagi bersepeda. Sebagian lain bersiap main layang-layang di persawahan dekat rumah.

Mestinya mereka berada di sekolah. Mendengarkan penjelasan guru. Tentang sang merah putih. Tentang Soekarno-Hatta yang membacakan teks proklamasi. Tentang hukum-hukum alam semesta dan unsur-unsurnya. Tentang hukum-hukum sosial dan dinamikanya. Juga tentang Tuhan dan kenabian.

Bisa juga nonton video dari *YouTube*. Tentang Indonesia dan kekayaan, keragaman, dan prestasinya. Bahkan tentang kekerasan, kemiskinan, ketidaktertiban. Nonton sampah di mana-mana. Lalu, beberapa berlatih membaca puisi, bernyanyi, menari, berpidato. Beberapa lagi berlatih baris-berbaris, senam, bola basket, dan sebagainya. Mereka bisa berteriak dan tertawa. Bahkan, terbahak-bahak. Bersama-sama. Mereka juga bisa merasakan takut, malu, gembira, optimistis. Bersama-sama. Merasakannya pada tataran kolektif.

Tapi, C-19 telah mengoloninya. Menjajahnya. Memaksa mereka tinggal di rumah. Belajar dari rumah secara virtual. Dengan bantuan telepon pintar atau laptop. Bagi yang punya. Yang tak punya, entahlah.

Belajarnya pun sering sendirian. Sering pula hanya ditemani kakek-nenek. Atau, pembantu rumah tangga. Tanpa canda. Tanpa

tawa. Tanpa sorak-sorai. Cara belajar yang miskin sentuhan humanistik. Padahal, belajar bukan hanya urusan transfer pengetahuan. Lebih dari itu. Belajar berurusan pula dengan kemanusiaan kolektif. Masih adakah jalan menumbuhkan dimensi kemanusiaan kolektif dari sekolah virtual?

Telepon pintar saya berdering. Teman saya di Surabaya memanggil. Dia bercerita. Kakaknya baru saja masuk rumah sakit. Bukan karena C-19. Tapi, dampak C-19. Konon, kakak teman saya itu stres berat, lalu terkena stroke. Usahanya rontok dihantam C-19. Dua bulan pertama dia harus mengurangi jam kerja karyawan. Gajinya masih bisa dibayar penuh. Bulan berikutnya mulai berkurang. Bulan berikutnya lagi karyawan dirumahkan. Menjelang keputusan merumahkan sebagian besar karyawan itulah kakak teman saya itu ambruk.

Saya teringat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Awal Agustus lalu. Saat dia menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5 % pada kuartal II. Suara Bu Ani, sapaan populer Menteri Keuangan, terdengar pelan dan berat. Tanpa canda dan tawa. Tak seperti biasanya. Mungkin karena angka minus 5 %. Meski Bu Ani tampak optimistis. Toh Indonesia tak sendirian. Seluruh dunia mengalami pertumbuhan minus. Bahkan, banyak negara minusnya melebihi Indonesia.

Tapi, minus 5 % tentu membebani. Indonesia bukan negara kaya saat C-19 menyerang. Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Keragaman sosial budaya dan masalahnya juga sangat kompleks. Angka pengangguran dan kemiskinan tentu akan meroket. Entah sampai kapan. Tentu dampak ikutannya bisa meluas. Bisa krisis sosial. Bahkan, krisis politik.

Sisi lain, kematian akibat C-19 masih susul-menyusul. Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-75 diiringi 57 nyawa melayang.

Jumlah kematian Indonesia menjadi 6.207 jiwa. Jumlah terinveksi 141.370 orang. Bertambah 1.821 dari hari sebelumnya.

Keprihatinan mendalam. Inilah yang tersembunyi di balik raut muka Presiden Joko Widodo. Tatkala memimpin mengheningkan cipta. Suaranya berat. Meski wajahnya berseri-seri. Menandai optimismenya. Negara memang wajib menjauhkan warganya dari bencana apapun. Meski ongkosnya tak murah. Negara wajib pula melindungi warganya dari keterpurukan ekonomi. Meski biayanya tak kecil.

Saya termenung. Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI kali ini sekaligus mengingatkan kita. Penjajahan ternyata bukan hanya manusia oleh manusia. Bukan hanya persoalan ideologi-politik. Bukan hanya berdimensi kultural. Penjajahan ternyata timbul pula dari sifat-sifat natural. Dari kerentanan (lingkungan) alam.

Maka, kemerdekaan juga bukan hanya tindakan ideologis-politis. Bukan hanya kehendak bersama untuk bebas dari jerat kebudayaan yang menghisap dan menistakan manusia. Kemerdekaan adalah hak dasar manusia untuk hidup bebas: keluar dari kemalangan hidup akibat kebudayaan maupun kerentanan alam.

Jalan yang ditempuh bisa pula membuahkan ideologi baru. Boleh jadi bukan kemerdekaan. Sebaliknya, malah penjajahan baru. Mungkinkah merdeka dari C-19 membuahkan krida saling melindungi, saling mengamankan antarmanusia, antarbangsa? Sebagai ideologi baru pascapandemi? Kita tak tahu apakah dunia pascapandemi C-19 aman dari ancaman virus mematikan jenis lain. Bukan hanya “virus” ideologi-politik yang membenarkan pembunuhan manusia oleh manusia.

Kita hari ini harus memerdekakan diri. Keluar secara cerdas dari buah simalakama. Antara dua kematian: kematian

akibat C-19 dan kematian akibat krisis sosial. Dirgahayu  
Indonesia!

*19 Agustus 2020*



# Gambar Haji Girah

**G**ambar tokoh itu mencuri perhatian saya. Persis saat status Banyuwangi dalam soal Covid-19 kembali pada zona merah. Gambar lelaki paruh baya bersongkok hitam lagi tersenyum. Beberapa berbaju merah, beberapa putih. Kedua tangannya bertemu menutup pusar. Orang Jawa bilang, “*ngapurancang*”. Sikap takzim seseorang kepada mitra tutur yang dihormati. Tertulis namanya: H. Sugirah. Saya melihatnya di sejumlah titik sepanjang jalan sejak masuk wilayah Banyuwangi.

Saya tak kenal tokoh itu. Melihat orangnya pun belum. Saya lacak lewat *Google*. Tak banyak data yang saya peroleh. Saya lalu mencari tahu dengan cara lain. Tak banyak pula informasi terkumpul. Tapi, saya menemukan kata kunci: “petani”. Tokoh itu ternyata petani sukses. “Tangan dan kaki saya penuh lumpur,”

ujar tokoh yang biasa disapa Haji Girah saat berkunjung ke markas *Radar Banyuwangi* (23 Juli 2020).

Senyum dan tampangnya di gambar itu khas *wong ndesa* (orang desa). Yang merefleksikan kebersahajaan. Namanya pun sederhana. Hanya satu kata: Sugirah. Khas nama *ndesa* tempo dulu. Boleh jadi pandangannya juga sederhana. Pun cita-citanya.

*Wong ndesa* memang identik dengan petani. Kaki-tangannya ber lumpur. Lalu, sikap *ngapurancang* bila berbicara dengan mitra tutur. Yang menandai penghormatan kepada *liyan* (orang lain). Juga kesediaan mendengar dengan penuh perhatian dan hormat. Sikap tidak *jumawa* (angkuh, congkak), rendah hati. Khas etika timur, etika *ndesa*.

Saya tahu bahwa Haji Girah adalah calon wakil bupati Banyuwangi. Berpasangan dengan Ipuk Fiestiandani, istri bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Pasangan ini akan berebut tahta Blambangan. Melawan pasangan Yusuf Widyatmoko – Muhammad Riza Aziziy. Yusuf Widyatmoko saat ini adalah wakil bupati Banyuwangi, wakilnya Abdullah Azwar Anas.

Tapi, catatan ini tak memasuki urusan politik. Saya hanya membaca secara semiotik gambar Haji Girah. Yang tiba-tiba menginspirasi saya saat Banyuwangi kembali pada zona merah. Bacaan secara semiotik lalu saya proyeksikan untuk Banyuwangi. Saya melihat nilai-nilai kebersahajaan, sikap ketakziman, pertanian sebagai sumber penghidupan rakyat merupakan kebutuhan penting dan kekuatan Banyuwangi. Untuk keluar dari prahara pandemi.

Nilai kebersahajaan, ketakziman, lalu ide-ide pertanian bisa pula dimiliki Ipuk Fiestiandani, Yusuf Widyatmoko, dan Muhammad Riza Aziziy. Bukan hanya Haji Girah yang kebetulan memang menekuni dunia petani. Saya melihat Banyuwangi ke depan membutuhkan kemampuan pemimpin dan rakyatnya



meracik secara cerdas dan kreatif antara kebersahajaan, ketakziman, dan pertanian dalam arti luas (agro kompleks). Inilah tantangan pemimpin baru Banyuwangi. Tatkala kita buta kapan pandemi berakhir. Tatkala pariwisata kehilangan daya gerak.

Pada catatan sebelumnya, “Menunggu Lawan” (*Radar Banyuwangi*, 29 Juli 2020), saya telah menyinggunginya. Banyuwangi dalam sepuluh tahun terakhir layak dikagumi. Banyak perkembangan positif. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan. Dari 20,09 % (2010) tinggal 7,52 % (2019). Pendapatan per kapita pun naik signifikan. Dari Rp. 20,86 juta per orang per tahun (2010) menjadi Rp. 51,8 juta (2019). Banyuwangi terus bersolek. Tampak molek dari luar. Pantas banyak penghargaan diterima.

Apa resepnya? Saya teringat jurus-jurus Anas. “Semua dinas adalah dinas pariwisata,” tuturnya dalam buku *Anti Mainstream Marketing: 20 Jurusan Inovasi Mengubah Banyuwangi*. Anas memilih jalan pariwisata. Saya paham. Banyuwangi memang potensial. Baik dari sisi alam maupun kebudayaan. Banyak hal eksotik bisa dikapitalisasi. Agar orang mau datang ke Banyuwangi.

Industri wisata juga melibatkan partisipasi masyarakat luas. Efek ekonominya luas. Pun ramah lingkungan. Diuntungkan pula oleh ekosistem digital dewasa ini. *YouTube* memang bisa menampilkan keindahan “api biru” kawah Gunung Ijen. Tapi, untuk menikmatinya butuh mendaki puncak Gunung Ijen. Tak cukup dari *YouTube*. Media sosial sangat membantu sebagai sarana promosi yang ampuh. Saya menyebut strategi pembangunan Anas dengan istilah “*anasnomics*”.

Saat kondisi normal *anasnomics* ampuh. Kunjungan turis meningkat tajam. Turis domestik dari 654.602 orang (2010)

menjadi 5,48 juta orang (2019). Turis mancanegara dari 16.977 orang (2010) menjadi 109.089 orang (2019).

Tapi, pandemi Covid-19 melumpuhkannya. Pariwisata babak belur. Gunung Ijen kembali sunyi. Hotel, resto, bandara, stasiun, dan pusat oleh-oleh sepi. Agenda Banyuwangi Festival – lokomotif *anasnomics* – berantakan.

*Anasnomics* kehilangan tuah. Banyuwangi menghadapi persoalan baru. Meski tak sendirian. Pandemi Covid-19 terbukti membentuk realitas baru. Yang membutuhkan sudut pandang baru. Yang menantang daya imajinasi-kreasi-inovasi. Baik pemimpin maupun masyarakatnya. Saya melihat nilai-nilai kebersahajaan, ketakziman, dan pertanian dalam arti luas (agro kompleks) dapat menjadi pijakan baru. Pijakan sosial-budaya dan pijakan ekonomi.

Kebersahajaan dan ketakziman adalah modal sosial. Sangat dibutuhkan masyarakat. Baik saat pandemi maupun pascapandemi. Untuk menjaga ketahanan sosial, imun sosial. Masyarakat Banyuwangi, saya kira, memilikinya. Sejarah membuktikan. Banyuwangi selalu menemukan pintu keluar dari prahara. Seperti kata (almarhum) Mbah Andang dalam “Umbul-Umbul Blambangan”: *Belambangan he seneng susahe wistah aja takon//Wis pirang-pirang jaman turun-temurun yong wis kelakon//Akeh prahara taping langitira magih biru yaral//Magih gedhe magih lampeg umbak umbul segaranira*. Mbah Andang benar. Tapi, butuh pula orang yang memimpin.

Pertanian dalam arti luas (agro kompleks) dapat menjadi lokomotif baru. Bidang yang menyediakan kebutuhan dasar itu relatif stabil. Dan, Banyuwangi sangat potensial. Sejak zaman Majapahit telah menjadi lumbung pangan nasional. Lalu, pariwisata ala *anasnomics* harus dimodifikasi. Bukan ditinggalkan. Model festival yang mengundang kerumunan besar tak lagi cocok.

Pemimpin baru Banyuwangi ditantang. Meracik resep buat keluar dari prahara pandemi. Sekaligus imun secara sosial dan ekonomi.

*14 September 2020*



## Bulan Bahasa

**T**ibalalah bulan Oktober. Kita menyebutnya “Bulan Bahasa”. Karena keberanian para pemuda pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928. Menetapkan satu bahasa persatuan: Bahasa Indonesia.

Tapi, greget kita terasa hambar. Seperti tak menyentuh kesadaran kolektif bangsa. Hanya di kalangan terbatas saja yang menanggapi. Seperti di Program Studi (Pendidikan) Bahasa/Sastra Indonesia; SMA/MA yang ada Jurusan Bahasa, atau lembaga bahasa.

Tidak pentingkah ditanggapi? Karena bangsa Indonesia *toh* sudah bisa berbahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia juga telah menjadi bahasa resmi negara? Karena gengsinya *toh* sudah naik, bukan sekadar *lingua franca*? Karena fungsinya tak di-

ragukan lagi, sudah jutaan karya ilmiah dan sastra ditulis dengan bahasa Indonesia?

Tak salah. Bahasa Indonesia memang hebat. Perkembangannya menakjubkan. Meski sikap positif dan kebanggaan masyarakat dewasa ini bisa dibilang masih memprihatinkan. Gengsi sosial bahasa Indonesia masih dianggap rendah dibandingkan bahasa asing. Maka, kita pun belajar bahasa Indonesia cenderung asal-asalan.

Kemampuan berbahasa Indonesia orang Indonesia masih memprihatinkan. Sebatas asal bisa, asal tahu. Lebih memprihatinkan lagi penggunaan pada kegiatan bernalar. Saya masih sering mendengar para pemimpin negeri ini keliru menggunakan kata *daripada*. Mereka menggunakannya untuk menghubungkan predikat dengan objek kalimat, atau untuk menyatakan milik. Misal, *bangsa Indonesia harus menghargai daripada budaya sendiri; kita harus meneruskan cita-cita daripada pendiri bangsa*. Kata *daripada* seharusnya digunakan untuk menandai perbandingan, seperti *pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih baik daripada tahun lalu*.

Saya juga masih sering mendengar para pembawa acara menyilakan waktu dan tempat. Bukan menyilakan seseorang. Juga menyebut “kesempatan yang berbahagia”. Kesempatan *kok* berbahagia? Bukankah yang berbahagia itu manusia? Lalu, di ragam tulis, saya sering sekali melihat kesalahan penulisan *di* sebagai kata depan dan awalan. Misal, ditulis *dirumah* seharusnya *di rumah*; *di tendang* seharusnya *ditendang*.

Tapi, saya masih sangat optimistis. Keyakinan kuat para penggagas Sumpah Pemuda (1928) tak salah. Paling tidak bahasa Indonesia dewasa ini telah nyata sebagai bahasa persatuan. Keanekaragaman Nusantara teratasi dengan bahasa Indonesia. Pun dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

kebudayaan. Namun, sikap positif yang kuat sangat dibutuhkan guna mengembangkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Jumlah penduduk Indonesia terbesar keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Strukturnya bagaikan piramida. Sekarang didominasi usia 0 – 30 tahun. Dua puluh lima tahun lagi Indonesia didominasi penduduk usia produktif. Saat Indonesia berusia 100 tahun. Dan, itu adalah pasar potensial. Siapapun akan datang tanpa diundang. Inilah momentum bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional.

Tapi, momentum itu juga akan sirna tanpa persiapan. Bahasa Indonesia harus terus dibenahi dari sisi ketatabahasaan. Bahasa Indonesia harus memiliki sistem yang memenuhi sifat kestabilan yang lentur (*flexible stability*). Juga harus mencapai tingkat intelektualisasi, terutama perbendaharaan kata. Agar bahasa Indonesia makin mantap sebagai sarana berpikir logis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Saya teringat usulan Harimurti Kridalaksana yang sudah lama sekali. Melalui kolom *Kompas* (15 Februari 1994), ahli linguistik itu mengusulkan jalan tengah pengembangan bahasa. Dia menyarankan peran lembaga bahasa yang tepercaya dan berwibawa, sekaligus mengakomodasi kreativitas penutur bahasa.

Saya sependapat dengan jalan tengah tersebut. Lembaga bahasa harus diperkuat. Diberi otoritas keahlian dan sarana yang memadai agar produknya bisa segera diikuti publik. Saya hormat dengan usulan lembaga bahasa tentang penggunaan kata *unggah* untuk menggantikan *upload*; kata *unduh* menggantikan *download*; kata *daring* (dalam jaringan) untuk menerjemahkan *online*, kata *gawai* menggantikan *gadget*. Publik menanggapi positif secara cepat.

Berbeda dengan kata *tetikus*, yang diusulkan untuk menggantikan *mouse* (piranti komputer yang menyerupai tikus). Atau, kata *swafoto* untuk menerjemahkan *selfie*. Publik ogah memakainya. Mengingatkan kita pada kata *sangkal* dan *mangkus*, yang ternyata penutur bahasa Indonesia lebih menyukai *efisien* dan *efektif*.

Saya juga hormat dan senang sekali dengan kreasi warga di Banyuwangi dan Jembrana. Meski lembaga bahasa belum merespons. Di sana kita bisa menemukan pemakaian *rumah cuci*. Bukan *laundry*. Di Banyuwangi ada Rumah Cuci Orie (Layanan Binatu di Jawa Timur). Di Jembrana ada Rumah Cuci Surya Dana (Binatu Cucian Kering di Negara, Bali). Memang *rumah cuci* belum muncul di *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Tapi, kreasi warga masyarakat itu bisa melengkapi lema *rumah* di KBBI: *rumah makan, rumah gadai, rumah bordil, ... rumah cuci*.

Penumbuhan sikap positif bahasa tampaknya tidak cukup melalui imbauan. Kita sudah punya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Kita juga sudah punya Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga diajarkan di sekolah formal hingga pendidikan tinggi.

Tapi, sikap positif masih jauh dari harapan. Keseriusan kita untuk belajar bahasa Indonesia masih kalah dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Saya menduga ada hubungannya juga dengan imbalan sosial. Kemampuan berbahasa Indonesia tak memiliki implikasi positif secara sosial. Berbeda dengan kemampuan berbahasa asing.

Maka, saya kira, perlu juga pendekatan imbalan sosial. Misal, kemampuan berbahasa Indonesia dimasukkan sebagai syarat seleksi ketenagakerjaan. Dimulai dari lembaga pemerintah, lalu



diikuti lembaga swasta. Kemampuan berbahasa niscaya merefleksikan kemampuan bernalar.

Kesempatan menumbuhkan sikap positif masih sangat terbuka. Mari kita mulai. Sekarang juga!

*3 Oktober 2020*



# TENTANG PENULIS

**ANDANG SUBAHARIANTO**, lahir di Blitar, 17 April 1965. Pendidikan dasar hingga tingkat atas ditempuh di Blitar. Pada tahun 1983 diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember, dan lulus pada tahun 1988 dengan keahlian bidang linguistik. Pendidikan Pascasarjana (S2) bidang antropologi diselesaikan pada tahun 2001 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Sejak tahun 1990 aktif sebagai dosen di Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Jember. Pada tahun 2002 s.d 2004 dipercaya sebagai Kepala Pusat Penelitian Budaya Jawa & Madura Lembaga Penelitian Universitas Jember; tahun 2004 s.d 2008 menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember; tahun 2008 s.d 2012 dipercaya sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Jember. Tahun 2016 hingga

sekarang dipercaya sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi oleh PERPENAS (Badan Penyelenggara).

Sejak muda di samping sebagai pengajar di almamaternya, aktif menjadi peneliti kebudayaan, dan penulis lepas di sejumlah media massa seperti *Kompas*, *Jawa Pos*, *Surya*. Beberapa hasil penelitiannya bersama tim diterbitkan sebagai buku, di antaranya: *Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur: Tantangan Industrialisasi Madura* (Malang: Bayumedia, 2004); *Madura Bicara PLTN* (Jember: Penerbit Universitas Jember, 2004); *Pangan, Makan, dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa dan Madura* (Yogyakarta: Galangpress, 2011); *Lokalitas dalam Musik Banyuwangian dan Campursari: Transformasi Diskursif dalam Postkolonialitas Kultural* (Yogyakarta: CV Diandra Kreatif, 2017); *Merawat Budaya/Merajut Kuasa: Identitas Using dalam Kontestasi Kepentingan* (Yogyakarta: CV Diandra Kreatif, 2017).

Di sela-sela bertugas sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, aktif mengisi kolom “Catatan” di *Jawa Pos Radar Banyuwangi*. Tulisan-tulisan di kolom tersebut telah diterbitkan sebagai buku oleh Untag B. Press. Yang pertama berjudul *Merajut Persatuan Merawat Kebangsaan* (2018); yang kedua berjudul *Membalik Arus Balik* (2020).

Dari masalah budaya, politik, pendidikan sampai penggunaan bahasa tidak lepas dari pengamatan dan analisis kritis penulis buku kumpulan artikel ini.

Tulisan-tulisannya sangat diwarnai oleh kalimat-kalimat pendek yang bernas. Analisisnya menunjukkan bahwa bukan sekedar pengetahuan umum atau akal sehat saja yang dipakai. Kelihatan bahwa penulis memiliki pengetahuan yang mendalam tentang semiotika, teori kritis dan linguistik.

Dengan tulisan-tulisan pendeknya itu, penulis sebetulnya membantu pembaca untuk membongkar bahwa di balik bahasa atau di balik informasi terkuak adanya retorika, manipulasi dan penyesatan. Tulisan-tulisannya tidak menggurui dan bukan bentuk pembodohan, tetapi pemberdayaan masyarakat untuk berpikir kritis.

— *Dr. Haryatmoko*

Penerbit

**UNTAG B-PRESS**

Jalan Adi Sucipto 26 Banyuwangi

Telp. 0333411248 - Fax 0333411248

**Untag**<sup>1983</sup>  
BANYUWANGI

ISBN 978-602-53709-9-1

